

**DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**AFIN KURNIA DEWANTARA
NIM. 125030500111055**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

**DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**AFIN KURNIA DEWANTARA
NIM. 125030500111055**



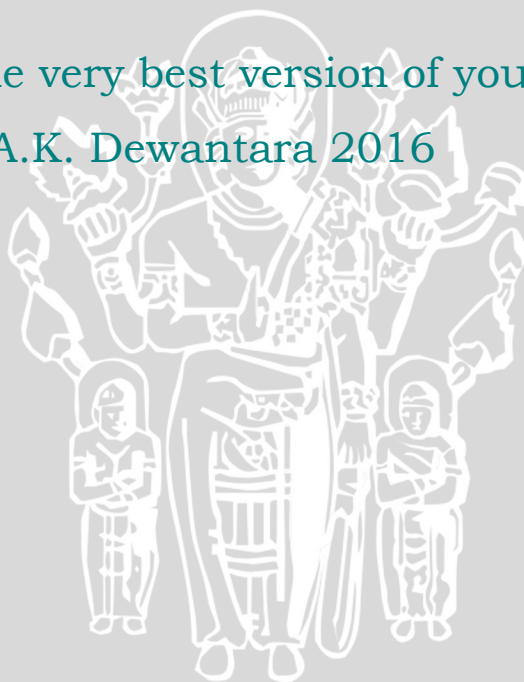
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

-MOTTO-

This planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds - Dalai Lama

Just Be The very best version of yourself

- A.K. Dewantara 2016



Dedicated For

Untuk Ibuku yang selama tiga tahun terakhir berjuang sendiri mencukupi kebutuhanku, Yang tidak pernah berhenti mendo'akan untuk kebbaikanku, dan untuk semua hal yang dia berikan padaku, serta untuk Almarhum Ayahku, semoga engkau bangga dengan anakmu.. dan untuk Adekku, semoga gelar sarjanamu bisa lebih cepat kau dapatkan daripada aku..

Cintya Uly Chardena, "bros before hoes", a best friends who always put me first..

Keluargaku Pengurus Harian HUMANISTIK 2015, Yessa, Fahmi, Adam, Eny, Indah, Rachul, Velli, Denok, Rani, Niki, Wanda, Dathul, Isa, terimakasih telah menjadi rumah tempatku berkeluh kesah..

K.C.B, Malang-Surabaya ditempuh hanya untuk tertawa, terimakasih Cicaq, Nyak, Fariz, Cahya, setidaknnya kita pernah muda..

Konco nemen, kalo boleh dibilang; Galih, Amanda (Zul juga), Ryan, Amel, Ihya', Galang, Fanny, Mas Adit, Rani, Defri.. tak lupa, Mbak Fima dan Roro, kuy main uno lagi..

Best Knight Of PSDM; Mas Nasir, Mbak Dayu, Yessa, Wida, Rangga, Riky, Hanir, Aldo, Tika, Uni, Febby, Odhi, Fiky, Azzam, Erina, Dimas, Devira, Pare, Diego, Dwi, Farah, Gilang, Irzad, Lesta, Vina, Mamet, Mutia, Pandu, Tiara. Terimakasih untuk kesempatan berbagi rasa, dan berproses bersama..

Keluargaku Biru Muda Arek Publik, Biru Muda Humanistik, 2013, 2014, 2015. Mbak, Mas, Teman, Adek, yang kalau disebutkan satu persatu akan jauh lebih banyak dari skripsi ini; terimakasih telah menjadi rumah untuk belajar, berproses, dan berhasil..

Sahabat Panitia Farewell Party Penak, Denok, Erni, Nadbul, Wanda, Rio, Tanjung, Anin, Pandu, Ivep, Zazen, Afif, Reynaldi, Hagi, Amin, Ilham, Nadya, dan Marina. Terima kasih telah mempersilahkan masuk. Terima kasih telah menyukseskan Farewell Party Government Administration 2012.

In honorable mention; Mbak Nanda, Mbak Intan, Mbak Cindy, Mbak Cipi, Mbak Tiara, Mas Arief, Ayyuk, Arie, Raka, Jibril, Reyhan, those who always inspire me..

Dan Semua Teman-teman Administrasi Pemerintahan 2012, can't get enough to thanks all of you..



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul : Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial
Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk**

Disusun oleh : Afin Kurnia Dewantara

NIM : 125030500111055

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 27 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S

NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Drs. Siswidiyanto, M.S

NIP. 19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

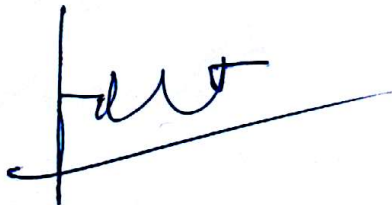
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Januari 2017
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atas nama : Afin Kurnia Dewantara
Judul : Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota



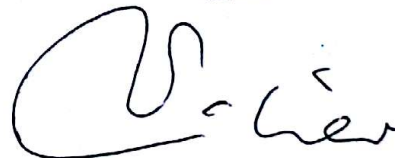
Dr. Drs. Siswidiyanto, M.S
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Dr. Drs. Rivanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Wike, S.Sos, M.PA, D.PA
NIP. 19701126 200212 2 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Desember 2016



Afin Kurnia Dewantara

125030500111055

RINGKASAN

Dewantara, Afin Kurnia. 2016. Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk. Minat Administrasi Pemerintahan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S., Dr. Drs. Siswidiyanto, M.S.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan, beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah pada komoditas yang dihasilkan. Pengembangan sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Di Kabupaten Nganjuk sendiri telah berdiri sebanyak 20 industri dengan skala besar semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Selain mudahnya mekanisme perijinan beberapa hal lain juga mendukung pesatnya pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut tentunya membawa dampak bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya pada kondisi ekonomi dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat berkembangnya kawasan industri terhadap sosial ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Dalam Menganalisis data peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk dalam bidang sosial antara lain adalah terjadinya pergeseran pekerjaan dari non-pekerja pabrik menjadi pekerja di pabrik dan gaya hidup masyarakat, serta terjadinya pertumbuhan tingkat migrasi di daerah sekitar berdirinya pabrik. Dampak pada bidang ekonomi masyarakat ditunjukan pada daya beli masyarakat yang dahulu hanya bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kini bisa memenuhi kebutuhan tersiernya dan peningkatan kepemilikan benda fisik masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dalam pengembangan kawasan industri ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup jeli dalam mengantisipasi adanya dampak negatif yang akan muncul akibat pembangunan ini, sehingga minim aduan atau laporan dari masyarakat terkait dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh pembangunan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk. Selain itu terdapat temuan lain dalam penelitian yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang dana CSR yang seharusnya dapat membantu mendukung pembangunan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia masyarakat sekitar.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dampak yang di akibatkan dari Pengembangan kawasan Industri di kabupaten Nganjuk cenderung positif karena pemerintah cukup jeli dalam pelaksanaan AMDAL sebelum pabrik-pabrik tersebut didirikan. Diharapkan pemerintah untuk berkoordinasi dengan instansi lain terkait pengembangan infrastruktur yang memadahi untuk pengembangan kawasan industri selanjutnya.

Kata Kunci : Dampak, Industri, Sosial Ekonomi

SUMMARY

Dewantara, Afin Kurnia. 2016. Impact of Industrial Zone Development Against Socioeconomic of Nganjuk Society. Major of Government Administration. Department of Public Administration. Brawijaya University of Malang. Chairman of the Advisory Committee: Prof. Dr. Susilo Zauhar, M.S. Member of the Advisory Committee: Dr. Drs. Siswidiyanto, M.S.

The role of the industrial sector in economic development is very important because the industrial sector has several advantages in development acceleration, some of these advantages include the contribution to employment absorption and value added to the commodities produced. The development of the industrial sector is expected to become the motor of the national economy. In Nganjuk itself has established 20 large-scale industries due to the enactment of the Regional Regulation No. 1 Year 2012 on Investment. In addition to ease on licensing mechanisms are some other things also support the rapid growth of the industrial sector in Nganjuk. This is certainly had an impact for the people in Nganjuk especially on economic and social issues.

This study aims to discover, describe, and analyze the impact that affected by the development of industrial zones to the socioeconomic of Nganjuk District Community. This study used a descriptive study with qualitative approach. In the analyzing the data researcher refers to the method proposed by Miles, Huberman, and Saldana.

This study results impact of the development of industrial zones in Nganjuk in the social sector including jobs change, from non-factory workers became a workers in factories and also lifestyles changing, and not forget to mention the growth rate of migration in the area around of the factory establishment. The impact of economic sectors in society is shown on the society's purchasing ability that previously could only fulfill the needs of both primary and secondary, can now fulfilled the needs of tertiary and also increased physical object ownership of Nganjuk society. In the development of this industrial areas, the Government of Nganjuk quite keen in anticipation of a negative impact arising from this development, so there is not much people that complaints or reports because the adverse impacts caused by the construction of industrial areas in Nganjuk. There are some other discovery in the study, that is the lack of public knowledge about CSR funds which should help support the development of Natural Resources and Human Resource of local communities

The conclusion that can be drawn is that in the impact of the development of Industrial area in Nganjuk district tend to be positive because the government is quite keen in the implementation of EIA before factories were established. It is expected the government to coordinate with other agencies or any other institutions related to develop a better infrastructure for the next development of industrial areas.

Keywords : *Impact, Industry, Socioeconomic*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah, Skripsi dengan Judul **“Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Sebagai pemenuhan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Luqman Hakim, Dr. Drs. M.Sc selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S selaku Ketua Komisi Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, bimbingan dan arahan serta kesabaran untuk terus memberikan perbaikan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Drs. Siswidiyanto, M.S selaku Anggota Komisi Pembimbing dalam penyusunan skripsi penulis. Terima kasih untuk kesabaran,

bimbingan, dan arahan perbaikan skripsi ini agar dapat terselesaikan dengan baik..

6. Segenap dosen pengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan selama masa perkuliahan, semoga dapat bermanfaat kelak.
7. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
8. Kepala dan seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang telah membantu dalam memberikan izin untuk melakukan penelitian di dinas terkait.
9. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu dan membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian:
 - a. Bapak Agung selaku informan dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk
 - b. Bapak Sumadji selaku informan dan Kepala Kelurahan Giyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
 - c. Dan Seluruh narasumber dari karyawan PT. Kharisma Baru Indonesia dan Warga Kelurahan Guyangan yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan informasi
10. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Agus Murianto (Alm) dan Ibu Titik Hernawati serta keluarga besar yang selalu senantiasa mendoakan

serta memberikan dukungan semangat yang tiada hentinya sampai terselesainya skripsi ini

11. Seluruh sahabat di Malang, sahabat di Nganjuk, Sahabat di Surabaya, Keluargaku Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK), Minat Administrasi Pemerintahan 2012, dan semua teman yang banyak menjadi teman *sharing* bagi penulis.

Serta untuk banyak pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu dalam mendukung terselesainya skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan dihati, Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan harapannya sedikit yang penulis berikan, bisa bermanfaat baik dan membawa sumbangsih terhadap keilmuan administrasi publik. Waalaikumsalam Wr. Wb.

Malang, 27 Desember 2016

Afin K. Dewantara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR ORISINALITAS	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Kontribusi Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Administrasi Publik.....	16
2.1.1 Pengertian Administrasi Publik.....	16
2.1.2 Peran Administrasi Publik.....	19
2.1.3 Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	22
2.2. Kebijakan Publik	23
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Siklus Kebijakan dan Informasi	25
2.3. Evaluasi Kebijakan Publik	30
2.3.1. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik	30
2.3.2. Evaluasi Dampak Kebijakan	34
2.4. Pertumbuhan Ekonomi	57
2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.4.2. Perubahan Sosial	34
2.4.2.1 Pengertian Perubahan Sosial.....	30
2.4.2.2 Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial.....	34

2.5. Pemerintah Daerah	30
2.5.1. Peran Pemerintah Daerah	30
2.5.2. Model Pemerintah Daerah	34
2.6. Konsep Industri	30
2.5.1. Pengertian Industri	30
2.5.2. Klasifikasi Industri	34

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	61
3.2. Fokus Penelitian	62
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian	63
3.4. Jenis dan Sumber Data	65
3.5. Teknik Pengumpulan Data	69
3.6. Instrumen Penelitian	72
3.7. Teknik Analisis Data	73

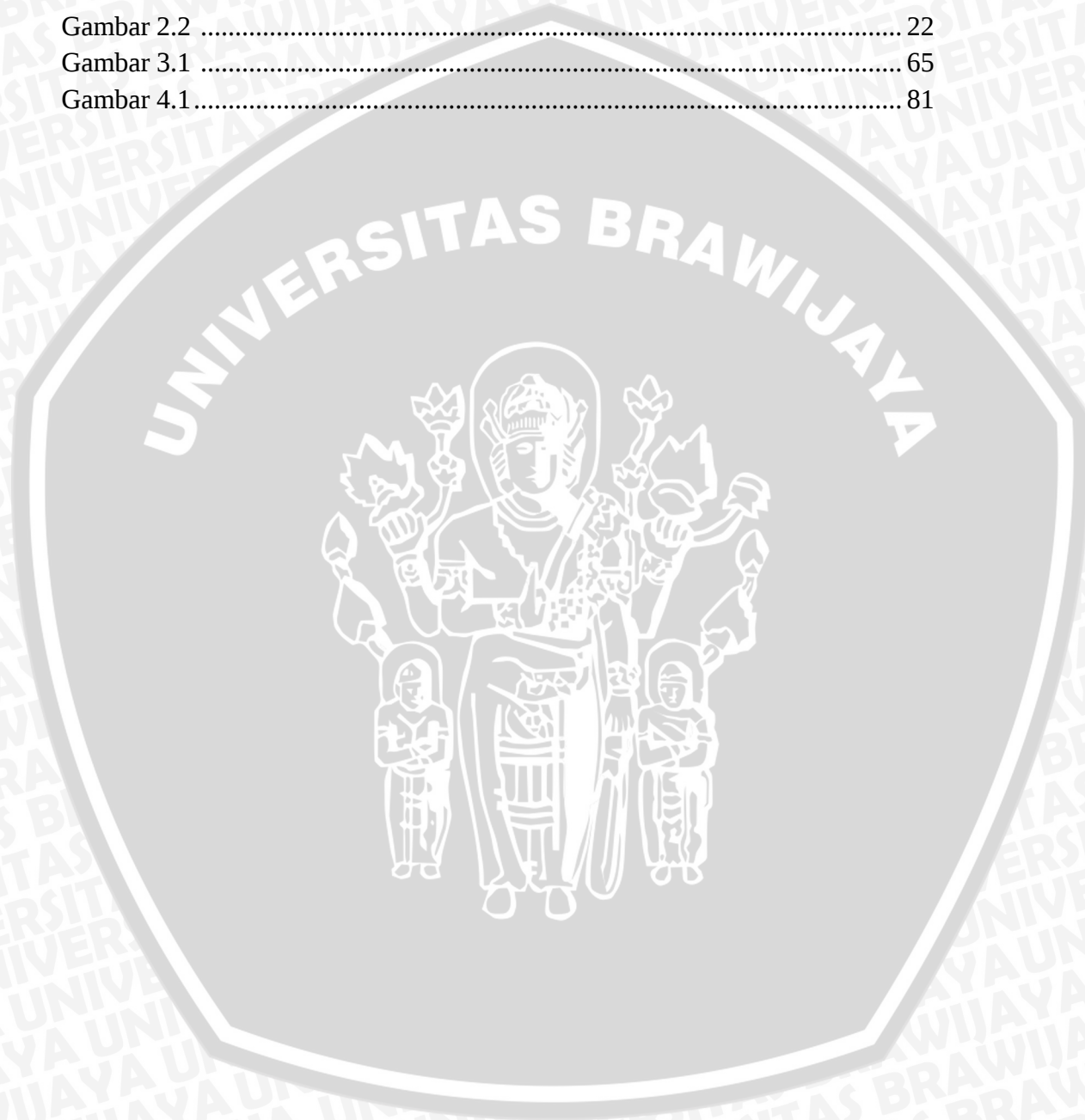
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Nganjuk	67
4.1.1.1 Kondisi Geografis	67
4.1.1.2 Topografi dan Geologi	69
4.1.1.3 Hidrologi dan Klimatologi	70
4.1.1.4 Penggunaan Lahan	71
4.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Nganjuk	73
4.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	77
4.2. Penyajian Data	78
4.2.1. Pengembangan Kawasan Industri	78
4.2.1.1 Dasar Kebijakan Pengembangan Industri	78
4.2.1.2 Proses Pengembangan Industri	80
4.2.2. Dampak Pengembangan Kawasan Industri terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk	82
4.2.2.1 Perubahan Sosial Masyarakat	82
1. Pergeseran Jenis Pekerjaan dan Gaya Hidup	82
2. Pertumbuhan Migrasi dan Interaksi Masyarakat	89
4.2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	92
1. Daya Beli Masyarakat	92
2. Kepemilikan Benda Fisik	94
4.2.3. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Dampak Negatif dan Memaksimalkan dampak Positif Pengembangan Kawasan Industri	96
4.2.3.1 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pengembangan Kawasan Industri	96
4.2.3.2 Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Dampak Positif Pengembangan Kawasan Industri	99
4.3. Analisis dan Interpretasi Data	100

4.3.1. Pengembangan Kawasan Industri	100
4.3.1.1 Dasar Kebijakan Pengembangan Industri	100
4.3.1.2 Proses Pengembangan Industri.....	102
4.3.2. Dampak Pengembangan Kawasan Industri terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk.....	104
4.3.2.1 Perubahan Sosial Masyarakat.....	104
1. Pergeseran Jenis Pekerjaan dan Gaya Hidup	105
2. Pertumbuhan Migrasi dan Interaksi Masyarakat	106
4.3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	108
1. Daya Beli Masyarakat.....	109
2. Kepemilikan Benda Fisik.....	110
4.3.3. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Dampak Negatif dan Memaksimalkan dampak Positif Pengembangan Kawasan Industri	111
4.3.3.1 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pengembangan Kawasan Industri.....	112
4.3.3.2 Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Dampak Positif Pengembangan Kawasan Industri	113
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	116
5.2 Temuan Penelitian.....	117
5.3. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA	xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	10
Gambar 2.1	21
Gambar 2.2	22
Gambar 3.1	65
Gambar 4.1	81



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	76
------------------	----



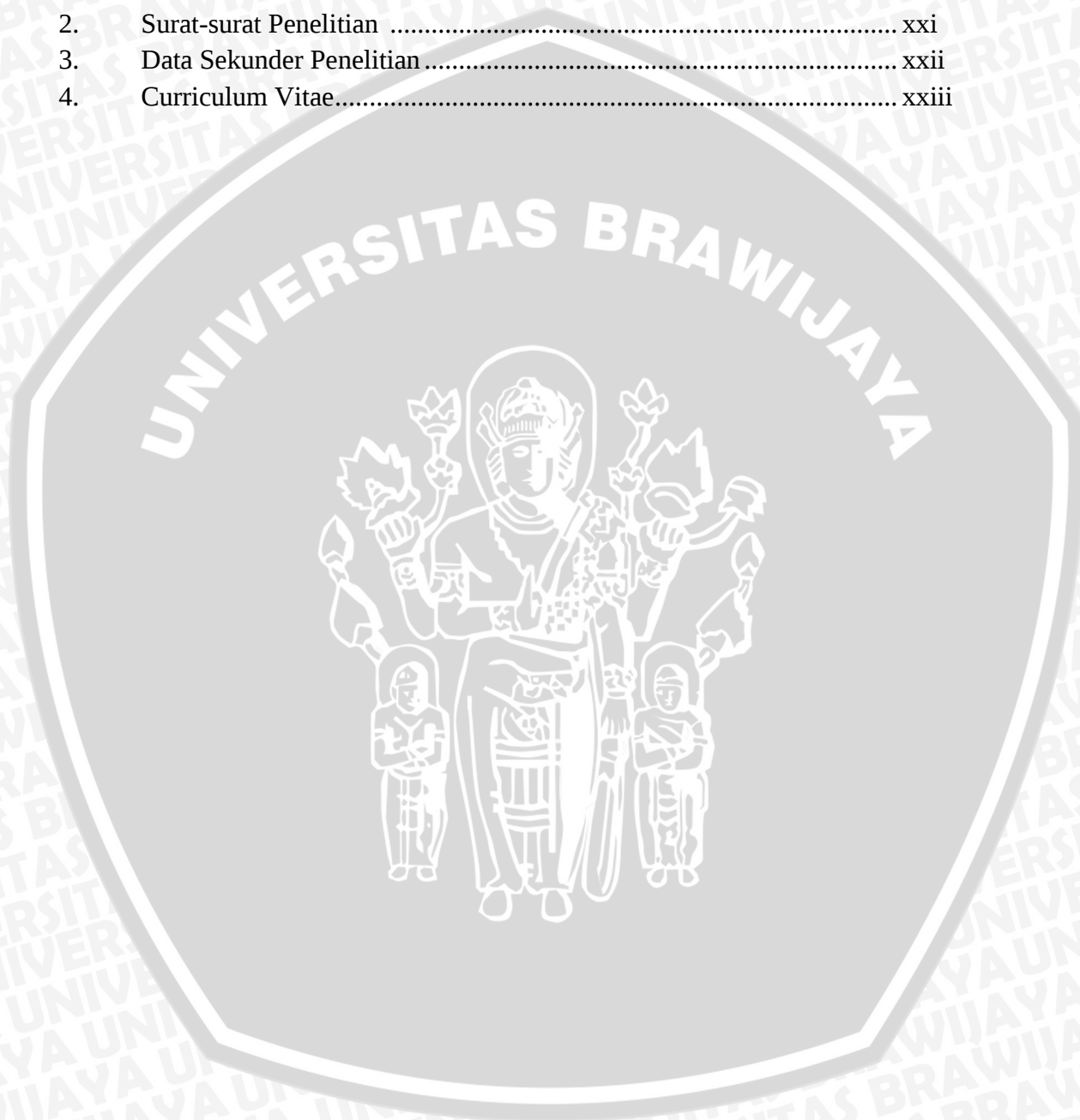
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	11
Tabel 2.1	37
Tabel 4.1.....	68
Tabel 4.2.....	70
Tabel 4.3.....	73
Tabel 4.4.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	xx
2.	Surat-surat Penelitian	xxi
3.	Data Sekunder Penelitian	xxii
4.	Curriculum Vitae.....	xxiii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi Industri Dunia dimulai antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, hal tersebut memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Revolusi Industri menimbulkan adanya imperialisme modern yang bertujuan mencari bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi hasil-hasil produksi serta perdagangan bebas yang melahirkan konsep liberalisme. Hal ini mengimbas pada negara-negara koloni, seperti juga wilayah-wilayah di Asia yang menjadi jajahan bangsa Eropa.

Dampak revolusi industri telah menimbulkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Secara umum, dampak revolusi industri bagi kehidupan penduduk antara lain bidang sosial dan ekonomi, budaya, dan politik, akibat berkembangnya industri dalam bidang sosial salah satunya adalah pusat pekerjaan berpindah ke kota sehingga terjadilah urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik di kota-kota besar. Revolusi Industri juga berpengaruh dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan pembangunan daerah-daerah industri yang dilakukan secara besar-besaran.

Industrialisasi telah menyebar keseluruh dunia yang dibawa Bangsa Eropa bersamaan dengan masa-masa penjajahan kolonial, negara-negara koloni maupun non-koloni mulai bergerak mengembangkan industri di negaranya untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat. Peningkatan kontribusi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Sektor Industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor rill. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, produk primer tersebut dapat diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Sesuai dengan tahapan perkembangan negara Indonesia, pemerintah mulai melakukan pergeseran andalan sektor ekonomi dari industri primer ke industri sekunder, khususnya industri manufaktur nonmigas.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang juga telah memulai pengembangan kawasan industri seperti Batam (Kepulauan Riau), Kawasan Industri di daerah Jabodetabek, Kawasan Industri di Jawa Timur seperti di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan, serta banyak lagi Kawasan Industri yang berkembang di Indonesia. Persebaran dan perkembangan industri di Indonesia tidak merata karena investor cenderung lebih memilih lokasi yang paling strategis dengan keberadaan Sumber Daya Manusia yang memadai untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik atau perusahaan, yaitu di kota-kota besar. Pengembangan kawasan industri khususnya di Provinsi Jawa Timur terjebak di Ring I seperti *Surabaya Industrial Estate* (SIER), PIER Pasuruan, Kawasan Industri Gresik (KIG), *Ngoro Industrial Park* (NIP) Mojokerto, dan Maspion di Gresik.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah yang mengikuti

Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah mulai berani berinovasi untuk menarik Investor-investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modal di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan salah satu isi dari UU No. 23 Tahun 2014 pada BAB IV Bagian kesatu Pasal 9 tentang klasifikasi urusan pemerintahan bahwa urusan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dilanjutkan pada Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa diantara urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan diantaranya adalah; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; perindustrian; dan perdagangan, yang diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten masing-masing.

Urusan pemerintah mengenai penanaman modal, perindustrian dan perdagangan kini mendapat perlakuan yang lebih istimewa karena menyambut pasar bebas ASEAN yang sudah mulai berjalan di awal tahun 2016, mau tidak mau pemerintah daerah harus bisa mengimbangi produk-produk luar negeri (impor) dengan lebih memperbanyak Industri dalam negeri yang nantinya akan dikonsumsi dalam negeri maupun diekspor keluar negeri. Keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan industri bisa dilihat dari diterbitkannya RPJMN Tahun 2015-2019 yang salah satunya berfokus pada transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah hanya 1.224,34 km² dengan populasi 1.045.598 jiwa dan sedang giat mengembangkan industri di daerahnya. Selama ini andalan dalam sektor ekonomi bertumpu pada hasil pertanian yang menyumbang 32,75% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Perdagangan, Hotel dan Restoran menduduki peringkat kedua dengan 22,95% total PDRB, dan Industri Pengolahan hanya menyumbang sebesar 4,98% dari total keseluruhan PDRB dari tahun 2005-2009 (nganjukkab.bps.go.id).

Dengan mulai masuknya industrialisasi di Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah setempat harus jeli dalam membuat kebijakan pengembangan industri, karena industri datang dengan segi positif dan negatifnya, selain membawa lapangan pekerjaan industri juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan karena limbah yang dihasilkan dan polusi yang dihasilkan apabila menggunakan mesin berbahan bakar gas. Oleh sebab itu perkembangan industri harus tetap dalam pengawasan pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai fungsi *controlling* tersebut nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan keuntungan yang didapatkan baik bagi masyarakat, pemerintah maupun investor, serta meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi akibat didirikannya sebuah industri di suatu tempat.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk memiliki tujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai pusat kawasan peruntukan pertanian di wilayah tengah pada wilayah Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing. Lebih dalam pada RTRW tersebut disebutkan beberapa strategi diantaranya pengembangan kawasan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

“Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata didukung dengan pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi : a. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan industri terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi; b. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan perdagangan dan jasa terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi; dan c. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan pariwisata terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi.”

Berikutnya pemerintah Kabupaten Nganjuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal. Perda inilah yang menjadi acuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Nganjuk (Disperindagkoptamben) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan rancangan-rancangan strategi untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri untuk mau berinvestasi di Kabupaten Nganjuk. Selain itu tujuan dari diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara pra-riset yang dilakukan peneliti dijelaskan bahwa setelah Perda ini diterbitkan pada tahun 2012, sebanyak lebih dari 20 industri dengan skala besar sudah didirikan, 15 diantaranya sudah mulai beroperasi akhir tahun 2014 silam, 3 dalam proses pembangunan, dan sisanya dalam tahap verifikasi perijinan dan peninjauan oleh BPPT Kabupaten Nganjuk. Di kawasan Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Kertosono sebanyak kurang lebih 2000 ha tanah yang dulunya adalah areal persawahan kini dialihfungsikan sebagai pabrik-pabrik pengolahan. Kecamatan Sukomoro merupakan salah satu kecamatan yang terkenal akan produksi bawang merahnya, tetapi saat ini akan tampak beberapa lahan pertanian yang terletak dipinggir jalan utama provinsi banyak lahan persawahan yang sudah menjadi Pabrik Textile dan Pabrik sepatu, begitu juga di Kecamatan Bagor yang sekarang terdapat pabrik sepatu dan pabrik rokok.

Selain mudahnya perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendirikan pabrik di Kabupaten Nganjuk, perkembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk juga di sebabkan oleh beberapa hal, dalam wawancara yang dilakukan penulis dalam pra-riset, Kepala BPPT, Bapak Agung menyebutkan bahwa;

“Selain Perda yang dimaksudkan tadi sebenarnya ada beberapa alasan lain kenapa pertumbuhan industri di Kabupaten Nganjuk meningkat drastis,

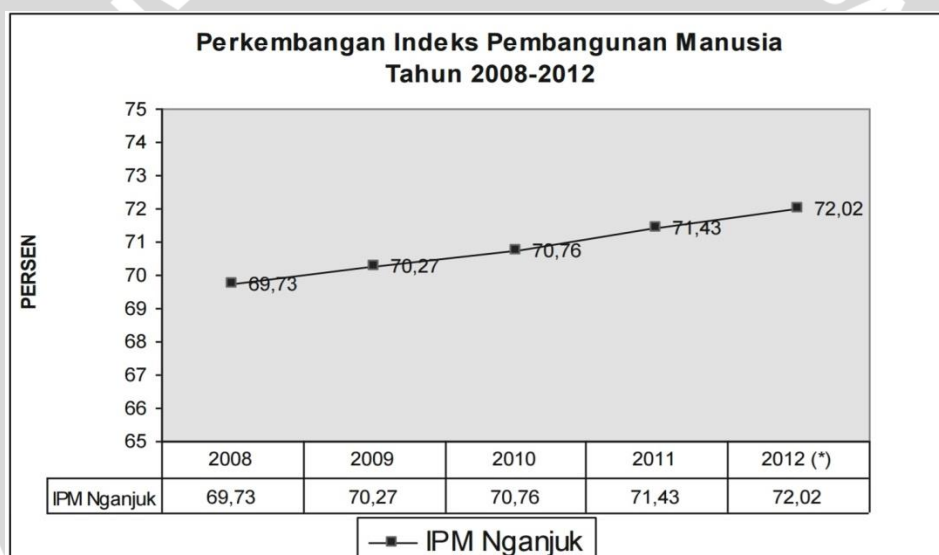
disini kami sedang mengembangkan kawasan industri, bukan zona industri seperti di Sidoarjo, Gresik atau Pasuruan, tidak menutup kemungkinan, tetapi mungkin tidak untuk saat ini. Alasan-alasan investor banyak melirik kabupaten nganjuk adalah kondisi keamanan di Kabupaten Nganjuk yang sangat baik, mungkin karena Kabupaten Nganjuk adalah kabupaten yang kecil sehingga tindak kriminal juga sedikit, selanjutnya adalah potensi lahan dan SDM yang memadai, karena sebenarnya banyak warga Nganjuk yang bekerja diluar kota karena tidak banyak perusahaan disini, dan juga mungkin karena UMR di kabupaten Nganjuk tidak setinggi di Surabaya, Sidoarjo dan kota-kota besar lainnya, selain itu saya rasa pembangunan tol Solo-Surabaya sedikit banyak mempengaruhi keinginan investor untuk mengembangkan industri disini karena nantinya aksesnya juga mudah”

Dengan banyaknya faktor pendukung yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Nganjuk ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mengambil kesempatan untuk terus mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Seiring dengan berkembangnya industri pengolahan/pabrik di Kabupaten Nganjuk hal tersebut membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan di daerah sekitar, pembangunan kawasan industri ini memungkinkan terciptanya peluang bisnis di sektor lain, usaha warung makan/kuliner, usaha kos-kosan, dan pertokoan. Dengan semakin menjamurnya usaha, tentu akan meningkatkan perekonomian warga sekitar pabrik. Dari data yang diperoleh di lapangan menggambarkan bahwa pasca dibukanya pabrik textile Lotus di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kini keadaan ekonomi warga sekitar semakin membaik, daya beli masyarakat sekitar mulai meningkat, toko-toko semakin banyak dan ramai, jumlah kendaraan di jalan juga semakin banyak, bahkan jasa laundry di pedesaan pun mulai ramai.

Dengan dibukanya banyak pabrik yang tidak hanya di Kecamatan Kertosono namun juga beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk juga membuka

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bukan hanya lapangan pekerjaan yang tersedia dari Pabrik itu sendiri tetapi juga lahan bisnis di daerah sekitar pabrik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk juga dikemukakan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti yang digambarkan dalam gambar berikut.



**Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2012**

Sumber : RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Angka IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2012 terus mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan nilai 69,73 pada Tahun 2012 IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 72,02. Peningkatan IPM yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berdampak

positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja penghitungan Indeks Pembangunan Manusia juga didasarkan pada faktor lain yaitu ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan.

Perkembangan pabrik di Kabupaten Nganjuk tidak hanya membawa dampak positif saja, dengan banyak berdirinya Pabrik atau industri pengolahan skala besar akan memakan lahan yang besar pula, hal ini menjadi sorotan masyarakat dan beberapa tokoh di kabupaten maupun provinsi. Berdasarkan data dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Produksi pertanian di Kabupaten Nganjuk merupakan sektor yang paling kecil pertumbuhannya dibandingkan sektor yang lain.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2012

No.	Sektor / Sub Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian	3,89	3,28	1,90	3,02	3,10	3,04
2	Pertambangan dan penggalian	1,85	1,25	3,22	8,58	8,80	4,74
3	Industri pengolahan	4,70	4,31	4,74	5,25	6,06	5,01
4	Listrik, gas dan air bersih	5,05	10,17	6,06	5,30	5,56	6,43
5	Bangunan	5,62	5,91	11,71	6,62	6,95	7,36
6	Perdagangan, hotel & restoran	7,96	9,62	11,37	9,54	10,19	9,74
7	Angkutan dan komunikasi	5,92	5,06	6,64	4,92	8,08	6,12
8	Keuangan	4,91	4,15	5,62	8,76	9,14	6,52
9	Jasa-jasa	8,80	7,61	7,57	7,76	6,58	7,66
	Jumlah PDRB	5,99	6,03	6,28	6,42	6,68	6,28

Sumber: RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Tabel tersebut menjelaskan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi disektor pertanian disebabkan oleh berkurangnya areal sawah produktif menjadi kurang

produktif dan berkurangnya daya dukung lahan sawah. Sektor Industri pada kurun waktu yang sama justru berbabding terbalik dengan sektor pertanian, sektor industri meningkat rata-rata 5,01 persen per tahun, dengan pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 4,70 persen; 4,31 persen; 4,74 persen; 5,25 persen, dan 6,06.

Dikutip dari artikel adakitanews.com, Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Arbayana KP mengatakan; saat ini mulai terjadi pengurangan lahan pertanian produktif oleh karenanya perlu adanya kajian kelayakan ekonomi, dan kajian kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dengan adanya penambahan industri baru di Nganjuk. Selain hilangnya lahan subur dan dampak negatifnya terhadap lingkungan, Arbayana juga mempertanyakan tumbuhnya perindustrian baru di Nganjuk yang menggunakan lahan pertanian. Sesuai Undang Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, apakah letak pembangunan pabrik tersebut tidak mengurangi lahan pertanian produktif yang ada di Nganjuk. Hal serupa juga beritakan oleh situs berita online lainnya bangsaonline.com Ketua Kajian Hukum dan Perburuhan (KHP) Jatim, Wahyu P Djatmiko mengatakan, mulai dari pengurangan lahan pertanian produktif, hilangnya lahan subur, kajian kelayakan ekonomi, dan kajian kelayakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Pemerintah Kabupaten Nganjuk harusnya lebih memperhatikan hal-hal tersebut untuk jangka panjangnya. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh warga sekitar terutama para petani pemilik sawah juga buruh tani, pemilik lahan sawah hidup bergantung pada hasil pertaniannya, belum lagi Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten penghasil bawang merah paling tinggi di Provinsi Jawa Timur dan apabila

penggggerusan lahan pertanian terus terjadi akan mengurangi jumlah produksi bawang merah. Terlebih lagi adalah para buruh tani, sebagian besar dari mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) apabila lahan pertanian semakin menipis para pemilik lahanpun akan mengurangi jumlah buruh atau pekerjanya, dan celaknya pabrik-pabrik yang mengambil alih lahan mereka memiliki persyaratan untuk pekerjanya minimal adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K).

Mendasarkan pada uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana berkembangnya kawasan industri di Kabupaten Nganjuk mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi warga disekitar kawasan industri tersebut untuk kemudian dituangkan dalm penelitian skripsi dengan Judul **“DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK”**

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah dampak pengembangan kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan dampak yang di timbulkan akibat pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten Nganjuk dalam meminimalisir dampak negatif dari pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penulisan ini secara akademis diharapkan dapat menambah wacana ilmiah mengenai kondisi industri di daerah dan upaya pemerintah dalam mengembangkannya melalui strategi-strategi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terakait, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemaparan dan menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri bagi dinas maupun instansi terkait. Selain itu bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat program maupun kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat maupun investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar dengan tujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui substansi yang terkandung di dalam karya ilmiah. Berdasarkan susunannya, karya ilmiah berupa proposal ini diuraikan ke dalam tiga bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi alasan dibuatnya karya ilmiah ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menyajikan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan penyusunan karya ilmiah tentunya berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Industri. Teori yang digunakan diantaranya otonomi daerah, pemerintah daerah, teori strategi, dan industri.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik

2.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan (*science*) baru berkembang sejak akhir abad yang lalu (abad XIX), tetapi administrasi sebagai satu seni atau administrasi dalam praktek, timbul bersamaan dengan munculnya peradaban manusia. Sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan satu fenomena masyarakat yang baru karena baru muncul sebagai satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, termasuk pengembangannya di Indonesia. Sekalipun administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri.

Pengembangan di bidang administrasi dalam rangka peningkatan kemampuan administrasi bukan hanya diperuntukan dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga organisasi-organisasi swasta, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Pasolong (2007:13) administrasi dalam arti sempit, yaitu kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan; catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Jadi tata usaha adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi yang akan

dipelajari. Sedangkan administrasi dalam arti luas dari kata *Administration* (Bahasa Inggris) diungkapkan oleh beberapa ahli yang dikutip Pasolong (2007:2013) yaitu :

- a. Menurut Leonard D. White, administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat semua usaha kelompok, negara atau Swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil ... dan sebagainya
- b. H.A. Simon dan kawan-kawan, administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
- c. William H. Newman, administrasi didefinisikan sebagai usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Dari beberapa pakar administrasi diatas yang mendeskripsikan administrasi, baik pakar dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Sedangkan Publik sendiri menurut H. George Frederickson (1997:46) yang dikutip dalam Pasolong (2007:6), konsep publik menjadi lima perspektif yaitu :

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- b. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui suara.
- d. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sendiri tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan dengan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.

- e. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

Jadi definisi Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Definisi administrasi publik menurut Waldo ada dua jenis, dalam Zauhar (1996:31) yaitu, “(1) Administrasi publik adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan pemerintah. (2) Administrasi publik adalah sebagai aktivitas pengelola terhadap masalah kenegaraan, disini administrasi selain sebagai ilmu juga sebagai seni”.

Berbagai uraian diatas merujuk pada suatu kesimpulan bahwa Administrasi Publik merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan menggunakan aturan-aturan yang diimplementasikan oleh pemerintah guna memenuhi kepentingan masyarakat atau publik.

2.1.2 Peran Administrasi Publik

Administrasi Publik berperan vital dalam suatu negara. Hal ini diungkapkan Karl Polanyi dalam Pasolong (2007:18), dikatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada dinamika administrasi publik. Gray (1989:15-16) yang dikutip Pasolong (2007:18) menjelaskan administrasi publik melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang bervariasi dari generasi ke

generasi berikutnya, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi selaras dengan budaya lain di lingkungannya. Sedangkan menurut Thoha (2010:92-94) administrasi publik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Jadi administrasi publik menekankan kepada peranan publik untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

2.1.3 Ruang Lingkup Adminiatrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik menurut Henry (1995) yang dikutip Pasolong (2007:19) adalah :

- a. Organisasi publik pada, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumberdaya manusia.
- c. Implementasi menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi

Aspek yang paling penting menentukan ruang lingkup administrasi publik ialah :

- a. Kebijakan Publik
- b. Birokrasi Publik
- c. Manajemen Publik
- d. Kepemimpinan
- e. Pelayanan Publik
- f. Administrasi Kepegawaian Negara
- g. Kinerja
- h. Etik Administrasi Publik

2.2 Kebijakan Publik (*Public Policy*)

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam posisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah, yang kemudian merupakan public issues, maka public policy sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa namun juga tidak boleh ditetapkan terlambat. Berikut adalah beberapa definisi kebijakan publik antara lain :

- a. *Public policy* merupakan suatu keputusan. Namun tidak hanya sekedar keputusan yang hidup “*a standing decision*”, yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (*public interest*). Dalam menetapkan kebijakan publik pasti menimbulkan pengorbanan dari sebagian masyarakat baik itu besar atau kecil. (Soenarko, 2005:44)
- b. *Public policy as a projected program of goals, values, and practices*. (Harol D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy, 1991:15)
- c. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. (Parsons, 2008:12)
- d. Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2004:55)
- e. *Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. (Thomas R. Dyr, 1978:4)

Profesor Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Beliau menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik sebagai berikut (Islamy, 1991:20-21) :

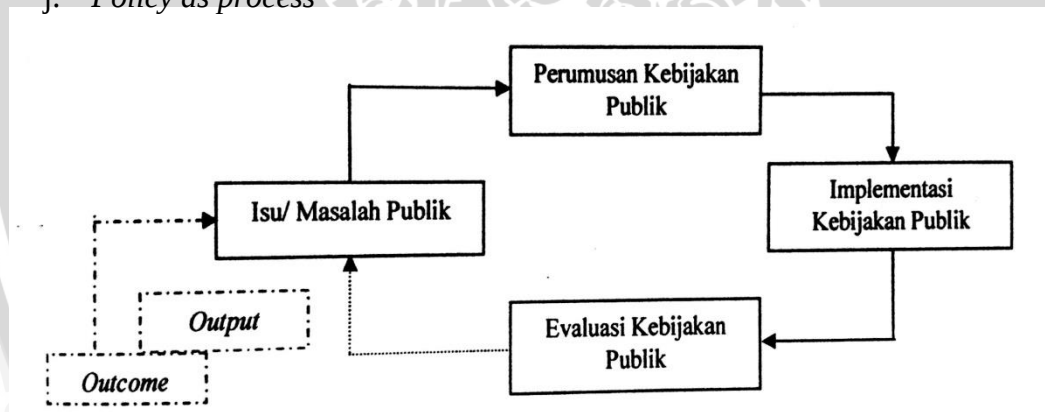
- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Brian W Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2005:18)

mengelompokkan makna public policy kedalam sepuluh macam yaitu :

- a. *Policy as a label for a field of activity*
- b. *Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*
- c. *Policy as specific proposals*
- d. *Policy as decision of government*
- e. *Policy as formal authorization*
- f. *Policy as programme*
- g. *Policy as output*
- h. *Policy as outcome*
- i. *Policy as theory or model*
- j. *Policy as process*



Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Sumber : Nugroho (2004:73)

Dari definisi-definisi diatas maka arti esensial dari kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi beberapa point antara lain:

- a. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan legal;
- b. Kebijakan publik dilaksanakan oleh pejabat berwenang untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (*public interests*)

- c. Kebijakan publik bermula dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
- d. Kebijakan publik merupakan sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan (*issues*) yang berkembang di masyarakat. Baik pemerintah melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan itu kebijakan publik.
- e. Kebijakan publik tidak berhenti di satu titik, melainkan berputar menurut isu-isu yang berkembang, permintaan dan keinginan (*demands*) rakyat, dan situasi yang menuntut diadakannya evaluasi kebijakan dan *reformulation of public policy*

2.2.2 Siklus Kebijakan dan Informasi

Palumbo menggunakan siklus kebijakan dan siklus informasi (*policy and information cycle*) untuk menunjukkan bagaimana siklus kebijakan berhubungan dengan informasi dan analisis evaluatif. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam gambar siklus kebijakan dan informasi model palumbo berikut ini.



Gambar 2.2 Policy and Information Cycle
 Sumber : Palumbo dalam Parsons (2008:549)

Gambar diatas menjelaskan bahwa fase penentuan agenda ikut berperan juga riset evaluasi dalam mendefinisikan ukuran dan distribusi problem, perkiraan kebutuhan dan pendefinisian problem, perkiraan dan pendefinisian kelompok dan area sasaran. (rossi dan Freeman dalam Parsons, 2008:548)

Fase desain kebijakan menggunakan teknik analisis keputusan dalam mengidentifikasi cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan program dengan maksud mendapatkan alternatif yang hemat biaya. Fase selanjutnya legitimasi kebijakan melibatkan evaluasi politik terhadap penerimaan suatu kebijakan atau program oleh publik dan stakeholder. Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi (Palumbo dalam Parson, 2008:548-549). Oleh sebab itu fase implementasi membutuhkan evaluasi formatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diukur untuk menghasilkan umpan balik (*feedback*) yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:548-550) mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan yaitu :

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
- b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak.
- c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program

Selanjutnya dalam fase siklus kebijakan Palumbo (fase dampak), informasi evaluatif adalah sumatif. Ia berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya.

Parsons menyatakan bahwa;

Evaluasi dimaksudkan untuk memperkirakan efek intervensi. Ini pada dasarnya adalah metodempenelitian komparatif: membandingkan, misalnya sebelum dan sesudah; membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain, atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol); membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi; atau membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari satu negara mengalami dampak uyang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama. Apapun pengukuran yang dipakai, kuantifikasi ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa evaluasi dampak adalah aktivitas yang membuat nilai, keyakinan politik partai, dan ideologi. Ia berusaha membuktikan bahwa kebijakan tertentu akan menimbulkan dampak tertentu. (Parsons, 2008:552-553)

Fase selanjutnya adalah terminasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Hogwood dan Peters bahwa terminasi, sebuah kebijakan atau program dihentikan, dikurangi, dan pengeluaran publik pada kebijakan itu akan dipotong. (Hogwood dan Peters dalam Parsons, 2008:574). Bardach dalam Parsons(2008:577) mengemukakan bahwa lima kondisi yang kondusif untuk terminasi adalah :

- a. Ketika pemerintah/administrasi yang baru mulai memegang kekuasaan.
- b. Delegitimasi matriks ideologi dimana kebijakan berada.
- c. Turbulensi atau kekacauan yang melemahkan keterikatan kepada kebijakan yang sudah ada
- d. Kebijakan mungkin didesain untuk dihentikan pada waktu tertentu.
- e. Melunakkan penghentian. Transmisi kebijakan dapat didesain untuk mengurangi kerugian bagi mereka yang terkena efeknya.

Terminasi akan melibatkan beberapa aspek kebijakan dan organisasi, yang menurut Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008:576-577) adalah:

- a. Fungsional: Akhir dari pelayanan atau tanggungjawab. Ini bisa berarti pemerintah tidak lagi terlibat dalam penyediaan pelayanan kesehatan, transportasi publik, produksi, dan distribusi energi ini adalah kategori yang mungkin paling tampak dalam bentuk privatisasi, dimana pemerintah menyerahkan semua atau sebagian kontrol pelayanan kepada pihak privat.
- b. Organisasional: dalam kasus ini pembuat kebijakan bisa memilih untuk membubarkan organisasi.
- c. Kebijakan: bentuk terminasi ini terjadi ketika pembuat kebijakan mengabaikan pendekatan yang sudah ada dan mengadopsi strategi baru atau definisi baru tentang problem.
- d. Program kebijakan akan menggunakan tindakan atau instrumen untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan. Program spesifik atau instrumen tertentu mungkin dihentikan sebagai bagian dari suksesi, inovasi atau pemeliharaan kebijakan yang lebih luas.

Terminasi kebijakan harus dilihat lebih sebagai sebuah aktivitas politik ketimbang sebagai pembuatan keputusan analitis, yakni aktivitas penyesuaian nilai-nilai ideologi, baik itu terbuka atau tersembunyi adalah kekuatan motivasi dan kekuatan penentu dibalik aktivitas terminasi. (De Leon dalam Parsons, 2008:579). Jadi terminasi pada dasarnya adalah keputusan politis, bukan keputusan rasional, yang merupakan hasil dari evaluasi atas dampak.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

2.3.1 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijakan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan publik dikenal adanya proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah proses perumusan kebijakan. Banyak Pakar kebijakan publik mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik. Hal itu karena proses perumusan kebijakan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Seorang *policy making* harus mampu

menangkap inti masalah dengan cermat, sehingga mampu memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran. Kesalahan pembuatan kebijakan dalam menetapkan inti masalah akan berpengaruh terhadap kurang efektivitas suatu kebijakan publik.

Tahap selanjutnya setelah sebuah kebijakan dirumuskan adalah tahap implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini seorang implementor selain harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan juga harus mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan kebijakan itu sendiri. Hal itu ditujukan agar dalam pelaksanaannya memiliki kesesuaian dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Namun dalam kenyataannya seringkali implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perumusan kebijakan sehingga muncul *implementation gap*. *Implementation gap* adalah suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan (Andrew Dunsire dalam Wahab, 2005:61). Hal ini disebabkan karena dalam proses implementasinya sering dipengaruhi oleh banyak hal terutama lingkungan dimana kebijakan itu diimplementasikan.

Untuk mengurangi terjadinya *implementation gap* tersebut, maka dalam proses kebijakan publik perlu adanya sebuah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan mempunyai peranan penting dalam menentukan kesuksesan kebijakan. Riant Nugroho (2003:184) menjelaskan bahwa tujuan pokok dari evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalahkan, akan tetapi untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dari suatu kebijakan publik.

Dengan evaluasi kebijakan dapat dilihat dimana letak kekurangan dari proses kebijakan, sehingga kemudian dapat menutup kekurangan tersebut.

Mengikuti pendapat dari William N. Dun, (1999) yang dikutip oleh Nugroho (2003:185) bahwa evaluasi dapat dikatakan sebagai penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*asesment*). Jadi evaluasi berkenaan dengan informasi mengenai nilai sebuah kebijakan. Selain itu juga kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Evaluasi kebijakan seringkali dipahami sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja (Winarno dalam Nugroho 2003:184). Sesungguhnya evaluasi kebijakan tidak terbatas hanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan saja, akan tetapi evaluasi terhadap seluruh proses kebijakan. Menurut Nugroho (2003:184) evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup yaitu evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi terhadap implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap lingkungan kebijakan. Sedangkan Anderson (1979:151), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terkait dengan perkiraan, penilaian, dan pengharapan dari kebijakan yang didalamnya terdapat isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan. Dari berbagai pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud evaluasi kebijakan adalah penilaian maupun penaksiran terhadap serangkaian proses kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga dampak yang ditimpulkan dari adanya kebijakan tersebut yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan empiris untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi memang diperlukan sejak langkah-langkah pertama, dimaksudkan agar kekeliruan dan kekurangan itu tidak akan lebih lanjut membawa akibat buruk atau merugikan. Dengan demikian dengan evaluasi itu maka perbaikan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk segera mengetahui dampak baik positif maupun negatif yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan hingga implementasinya, hal ini berarti :

- a. Pemborosan tenaga, pikiran, biaya dan waktu dapat ditanggulangi
- b. Kekeliruan keputusan-keputusan dalam kebijakan dan langkah-langkah yang salah dapat segera diperbaiki.
- c. Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan segera dapat diadakan

Evaluasi merupakan hal penting bagi tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, sebab evaluasi ada pada tiap tahap dalam *policy making*. Jadi dari sana akan dinilai apa yang menjadi output dan/atau outcome suatu kebijakan yang selanjutnya menjadi input guna revisi kebijakan baik dalam bentuk perbaikan implementasi kebijakan maupun perumusan kebijakan kembali (*reformulation*). Selain itu evaluasi kebijakan juga mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan Samodra Wibawa dalam Nugroho (2003:186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat

- mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
 - c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
 - d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dari beberapa pemaparan yang disajikan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk mengetahui beberapa hal mulai dari pelaksanaan program, kesesuaian tindakan pelaku kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, output yang dihasilkan, hingga akibat yang ditimbulkan oleh adanya sebuah kebijakan. Untuk itu melalui studi evaluasi kebijakan peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui tentang perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pengembangan kawasan industri yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap masyarakat sekitarnya.

2.3.2 Evaluasi Dampak Kebijakan

Sebaik apapun kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan-tujuannya tidak selalu dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Hal ini disebabkan dalam proses implementasinya sering terbentur oleh banyak hal sehingga muncul apa yang disebut *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Dalam kaitanya dalam hal ini maka peran evaluasi

sangat penting untuk mengetahui berbagai kendala, benturan serta pada akhirnya diarahkan pada dampak yang ditimbulkan dari proses implementasi kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa adanya implementation gap akan mempengaruhi dampak dari kebijakan itu sendiri. Jika gap dalam implementasi kebijakan tersebut semakin lebar, maka dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut juga akan semakin besar.

Pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk mengetahui empat aspek, yaitu 1) proses pembuatan kebijakan, 2) proses implementasi kebijakan, 3) konsekuensi kebijakan, dan 4) efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan maupun konteks kebijakan-kondisi lingkungan mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Wibawa (1994:9).

Evaluasi pada dasarnya memiliki dua aspek yang saling berhubungan, pertama evaluasi kebijakan dan unsur pokok programnya, kedua evaluasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan program. Sedangkan evaluasi berfokus pada dua dimensi yaitu; pertama bagaimana sebuah kebijakan diukur berlawanan dengan tujuan yang dikemukakan untuk dicapai, kedua dampak sebenarnya dari kebijakan. Studi dampak dengan kata lain menyampaikan efek dari kebijakan secara keseluruhan atau proses dimana implementasi telah mengambil alih (Parsons, 1997:543-545). Anderson (1997:153) menyebutkan bahwa dalam mendiskusikan tentang dampak dan evaluasi, maka penting untuk mengetahui

perbedaan antara output kebijakan (*policy output*) dan dampak kebijakan (*policy outcome*). *Policy Output* adalah hal-hal yang dilakukan pemerintah sedangkan *policy outcomes* berhubungan dengan berbagai perubahan pada lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh *policy action*.

Dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi. Anderson (1979:153) menyebutkan ada lima dimensi dampak kebijakan, yaitu:

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intenden concequences*) atau tidak diharapkan (*unintended concequences*)
- b. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dai kebijakan tersebut.
- c. Dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang
- d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*)
- e. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat.

Sementara itu Langbein dalam Wibawa (1994:38) menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi dampak kebijakan, yaitu:

- a. Waktu. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang.
- b. Selisih antara dampak aktual yang diharapkan. Evaluator harus dapat menilai berbagai dampak yang tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian saja diinginkan, dan dampak yang sama sekali tidak diinginkan.
- c. Tingkat agregasi dampak. Status dampak dapat bersifat agregatif dalam arti dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan nmempengaruhi pada perubahan masyarakat satu desa.
- d. Jenis dampak

Melalui berbagai dimensi dari dampak kebijakan diatas, maka peneliti akan menganalisa dampak mengenai kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan lebih fokus.

Aspek lain yang perlu diperhatikan untuk mengetahui dampak kebijakan publik adalah berbagai unit sosial pendampak. Wibawa (1994:54) mengemukakan bahwa terdapat lima unit sosial pendampak, diantaranya:

- a. Dampak individual. Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta personal.
- b. Dampak organisasional. Dampak secara organisasional dapat timbul baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Secara tidak langsung misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.
- c. Dampak terhadap masyarakat. Dampak ini merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.
- d. Respon terhadap dampak kebijakan. Seseorang yang terkena dampak dapat melakukan berbagai macam reaksi, seperti reaktif-konfrontatif, bisa pula adaptif-konformitis, atau bisa diantara keduanya.
- e. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Dampak ini dapat menimbulkan perubahan terhadap lembaga maupun sistem sosial. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa indikator;
 1. Kelebihan beban
 2. Distribusi yang tidak merata
 3. Persediaan sumber daya yang dianggap kurang
 4. Adaptasi lemah

5. Koordinasi yang kurang baik
6. Turunnya dukungan (legitimasi)
7. Turunnya kepercayaan

Dari deskripsi diatas, peneliti dapat menganalisa dampak kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk. Dampak kebijakan yang ingin diungkap oleh peneliti dilakukan melalui penelitian evaluasi.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Sosial

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dapat dipahami dengan berbagai pemahaman, ahli politik melihat pembangunan dari proses input, konversi, output, dan umpan balik serta efek politik, pergolakan atau labilitas politik dan hubungan-hubungan kelembagaan struktur politi, baik suprastruktur maupun infrastruktur politik serta hubungan politik antar negara. Sedangkan dalam konsep ekonomi pembangunan lebih dipahami sebagai pertumbuhan. Konsep pertumbuhan (*growth*) dalam konteks ekonomi lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan yaitu kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu. Rostow dalam Suryono (2004:26) menjelaskan dalam teorinya tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, menurutnya terdapat lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi, adapun tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap masyarakat tradisional
- b. Penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis
- c. Tahap tinggal landas
- d. Tahap pematangan (pendewasaan) ekonomi
- e. Tahap konsumsi massa tinggi

Lebih lanjut Suryono (2004:26) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan tiga faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia.
- b. Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Selanjutnya Tadaro (2009:98) juga menjelaskan beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang diamati dari :

- a. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita; dimana jika pendapatan suatu masyarakat melebihi jumlah penduduk, maka pendapatan perkapita juga meningkat.
- b. Tingkat pertumbuhan produktivitas yang ditunjukan oleh sejauh mana tingkat efisiensi kerja ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- c. Tingkat transformasi struktur ekonomi, misalnya dari ekonomi barter ke ekonomi uang, perubahan dari usaha rumah tangga ke perusahaan besar.
- d. Tingkat transformasi soial, politik, dan ideologi, yaitu perubahan dan pematangan sistem sosial, politik, dan ideologi nasional.
- e. Jangkauan ekonomi internasional, yaitu sejauh mana pengaruh ekonomi nasional negara yang bersangkutan terhadap ekonomi internasional.

Dari pemaparan di atas dapat diasumsikan bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan dapat tercapai jika sebuah negara memiliki faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi baik akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, maupun kemajuan teknologi. Namun dalam kenyataanya teori tersebut tidak terbukti dengan baik khususnya di negara-negara berkembang. Di negara-negara maju teori tersebut lebih bisa diaplikasikan dengan baik karena mempunyai faktor-faktor pendukung dan memiliki keamtangan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh Todaro (2000:99) dengan memberikan contoh

program Marshall Plan yang demikian berhasil dilaksanakan di Eropa. Hal ini dikarenakan negara-negara Eropa memiliki atau memenuhi syarat-syarat struktural, institusional, dan sikap-sikap yang diperlukan seperti adanya pasar-pasar komoditi dan pasar uang yang lebih terintegrasi dengan baik, tersedianya fasilitas transportasi yang memadai, tenaga kerja yang terlatih, motivasi yang tinggi dan birokrasi pemerintahan yang efisien. Namun di negara-negara terbelakang atau yang sedang berkembang keadaan sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa tidak dapat terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan negara berkembang tidak memiliki faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai dengan baik jika hanya menggantungkan diri pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung dengan faktor-faktor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Adanya fasilitas ekonomi yang baik seperti fasilitas transportasi, pasar, dan sebagainya
- b. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas
- c. Birokrasi pemerintahan yang baik
- d. Dukungan dari masyarakat luar, dsb.

2.4.2 Perubahan Sosial

2.4.2.1 Pengertian Perubahan Sosial

Masalah perubahan sosial telah menjadi fokus kajian sejak awal abad ke 19. Dengan adanya globalisasi maka kanjian terhadap perubahan sosial semakin sering dibicarakan. Konsep perubahan berhubungan dengan proses, perbedaan dan dimensi waktu (Kanto, 2006:5). Perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau diamati dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi mungkin lebih ke arah kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*regress*). Perubahan sosial ke arah kemajuan identik dengan konsep pembangunan (*development*) yang umumnya merupakan dampak yang dikehendaki, sebaliknya dengan kemunduran yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dalam masyarakat.

Ada beberapa pengertian tentang perubahan sosial yang diungkapkan oleh beberapa ahli, Kanto (2006:5) dalam bukunya Modernisasi dan Perubahan Sosial mengutip beberapa pendapat dari beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, antara lain:

- a. Gillin dan Gillin yang mengemukakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena difusi penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- b. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia, dimana modifikasi ini muncul karena sebab intern maupun ekstern.
- c. Soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- d. Moore memfokuskan perubahan sosial sebagai perubahan dalam struktur sosial, yaitu perubahan pola-pola perilaku dan interaksi sosial.

- e. Laurer berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan konsep yang serba mencakup, yang menunjuk pada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai tingkat individual hingga tingkat dunia.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan aspek-aspek sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat tersebut misalnya perubahan dalam nilai dan norma sosial, proses-proses sosial, pola perilaku sosial dan gaya hidup, stratifikasi sosial dan kelembagaan masyarakat.

Perubahan sosial mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena terkait dengan perubahan dalam berbagai aspek sosial. Oleh karena itu setiap kajian perubahan sosial perlu membatasi dan memfokuskan pada aspek perubahan sosial tertentu dalam masyarakat. Sebagai bahan perbandingan, dalam tabel dibawah ini disajikan tingkat analisa perubahan sosial menurut Laurer dalam Kanto (2006:9)

Tabel 2.1 Tingkat Analisis Perubahan Sosial

Tingkat Analisis	Wakil Kawasan Studi	Wakil Unit-unit Studi
Global	Organisasi dan ketimpangan internasional	GNP, data perdagangan
Peradaban	Lingkungan peradaban, kehidupan	Inovasi ilmiah, kesenian, institusi sosial
Kebudayaan	Kebudayaan material dan non material	Teknologi, ideologi, nilai
Masyarakat	Sistem statifikasi, demografi, kejahatan	Pendapatan, kekuasaan, gengsi peranan, tingkat migrasi, tingkat pembunuhan
Komunitas	Sistem statifikasi, demografi, kejahatan	Pendapatan, kekuasaan, gengsi peranan, tingkat

Institusi	Ekonomi, pemerintahan, agama, perkawinan, keluarga, pendidikan	pembunuhan Pendapatan keluarga, pola pemilihan umum, jemaah, tingkat perceraian, proporsi penduduk di perguruan tinggi
Organisasi	Struktur, pola interaksi, struktur kekuasaan, produktivitas	Peranan, klik, persahabatan, administrasi tingkat produksi, output per pekerja
Interaksi	Tipe interaksi, komunikasi	Konflik, kompetisi, partisipasi, interaksi
Individu	Sikap	Keyakinan tentang persoalan, aspirasi

Sumber : Kanto Modernisasi dan Perubahan Sosial (2006:9)

2.4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat pasti diakibatkan oleh adanya suatu sebab yang menimbulkannya. Demikian juga dengan perubahan sosial, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor penyebab yang berasal dari luar masyarakat setempat. Menurut Kanto (2006:11) beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan sosial di masyarakat adalah sebagai berikut

1.) Faktor Intern

- a. Inovasi. Proses terjadinya inovasi dimulai dengan adanya suatu penemuan baru khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Temuan baru ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan bukan

untuk pemecahan masalah dalam masyarakat. Dari temuan baru tersebut kemudian berkembang menjadi invention yang dikaitkan dengan pemecahan masalah. Invention ini merupakan inovasi jika dalam penerapannya di masyarakat pengguna memberikan dampak pembaharuan atau terjadi perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya. Jadi inovasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh McLuhan dalam Gumylar (2008) yang menganggap bahwa inovasi-inovasi dalam bidang teknologi banyak berpengaruh terhadap perkembangan di dalam masyarakat.

- b. Perubahan struktur dan Jumlah Penduduk. Perubahan ini pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat, misalnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan dalam dunia kerja. Perubahan penduduk juga akan berpengaruh terhadap struktur kemasyarakatan, seperti struktur umur maupun yang lainnya. Selain itu perubahan jumlah penduduk karena migrasi juga akan mengakibatkan kekosongan-kekosongan dalam stratifikasi sosial dan pembagian kerja. Semakin cepat terjadinya migrasi (baik masuk maupun keluar) akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.
- c. Konflik sosial. Konflik sosial bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok dalam suatu masyarakat. Selain itu konflik

juga dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap nilai sosial budaya dalam masyarakat.

d. Gerakan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya gerakan sosial, menurut Kanto (2006:14) antara lain :

- a) Terjadinya kegagalan sosial dalam suatu institusi atau organisasi sosial
- b) Ketidakpuasan individu
- c) Timbulnya keresahan sosial dalam masyarakat
- d) Adanya peluang untuk membentuk suatu institusi baru atau suatu tatanan baru yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

2.) Faktor Ekstern

- a. Inovasi. Seiring dengan kemajuan di bidang informasi dan komunikasi, maka proses inovasi tidak hanya bersifat intern melainkan juga bersifat ekstern. Hali ini biasanya terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang, misalnya melalui transfer teknologi dari masyarakat yang lebih maju ke masyarakat yang kurang maju.
- b. Peperangan. Peperangan akan mengakibatkan terjadinya perubahan khususnya perubahan sosial budaya, hal ini dikarenakan pihak yang menang akan berusaha untuk menahan kondisi sosial budaya mereka terhadap pihak yang kalah. Pertemuan antara kedua kebudayaan tersebut akan menimbulkan terjadinya akulturasi budaya yang pada akhirnya akan menimbulkan kebudayaan baru dalam masyarakat.
- c. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terutama perubahan lingkungan fisik juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan lingkungan fisik pada umumnya diakibatkan oleh adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

Bencana-bencana tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah penduduk yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, perubahan struktur masyarakat, perubahan stratifikasi sosial masyarakat dan bahkan perubahan dalam sistem kekerabatan.

- d. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dalam masyarakat yang terbuka tidak dapat dihindari pertukaran budaya. Pertemuan dua kebudayaan tersebut akan mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya yang pada akhirnya akan menimbulkan budaya baru.

2.5 Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota. Setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemantuan.

Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Pemerintah daerah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah yang berdaulat gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di suatu negara, meliputi

badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden dan para menteri (Budiyanto, 2005:25)

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 tahun 2004, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah dapat berupa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi, yakni terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, yakni terdiri dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota, dan pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan

kelurahan. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Haris (1998) yang dikutip Nurcholis (2007:26) menjelaskan bahwa pemerintah yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintah nasional.

Pemerintahan ini diberikan kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggungjawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

De Gusman dan Taples yang dikutip Nurcholis (2007:26) menyebutkan unsur-unsur pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

2.5.1 Peran Pemerintah Daerah

Pandangan tradisional tentang pemerintah daerah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*", dalam bukunya tersebut dia menjelaskan bahwa "pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari penyelenggaraan dan inovasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti". Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Namun sekarang kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena kelemahan atau kegagalan mekanisme pasar dalam memberikan layanan publik yang efisien, adil, serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menuntut untuk dipenuhi.

Menghadapi persoalan kegagalan pasar tersebut peran dari pemerintah diperluas tidak hanya untuk sekedar pertahanan, pengadilan, dan polisional semata ang mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Untuk mengatasi kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah tersebut, Osborne dan Gaebler (1992) yang dikutip Muluk (2006:38) mengungkapkan bahwa sebaiknya pemerintah berorientasi pada pasar. Usul tersebut tidak berarti pemerintah harus mempergunakan mekanisme administrasi yang lebih sederhana dengan memperbesar mekanisme pasar dalam mencapai tugas-tugas pemerintah.

2.5.2 Model Peran Pemerintah Daerah

Model peran pemerintah daerah yang paling lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang adalah model *traditional bureaucratic authority*. Ciri model ini adalah pemerintahan daerah yang bergerak dalam kombinasi tiga faktor, *Pertama*, penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (*strong public sector*). *Kedua*, peran pemerintah daerah sangat kuat (*strong local government*) karena memiliki cakupan fungsi yang luas, model operasi yang bersifat mengarah, derajat otonomi yang sangat tinggi dan tingkat kendali eksternal yang rendah. *Ketiga*, pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (*representative democracy*)

Leach, Stewart, dan Walsh (1994) yang dikutip dalam Muluk (2006:43) mengungkapkan suatu alternatif perubahan dari model *traditional bureaucratic authority* tersebut menuju model alternatif yang dinilai lebih ideal, yaitu :

- a. *The rexidual enabling authority* menggabungkan penekanan pada *strong market* dengan peran pemerintah daerah yang lemah dan berdiri diatas bentuk demokrasi yang netral, baik terhadap bentuk *representative democracy* maupun *participatory democracy*.
- b. *The market-oriented enabling authority* merupakan kombinasi dari penekanan pada *Strong market* dengan pemerintah daerah yang kuat disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Seperti halnya dengan *rexidual authority*, model ini mengutamakan pasar dalam urusan pemerintah daerah, namun berbeda dalam *starting-pointnya*. Pemerintah mempunyai peran yang kuat dan aktif dalam menentukan masa depan perekonomian di wilayahnya.
- c. *The community-oriented authority* merupakan gabungan dari penekanan pada demokrasi partisipatif yang kuat atau setidaknya ada di posisi tengah dalam hubungan dengan *weak or strong local governance* serta penekanan antara sektor publik dan pasar.

2.6 Konsep Industri

2.6.1 Pengertian Industri

Pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Menurut Undang-Undang No. 03 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Dumairy (1996:227), istilah industri mempunyai dua arti yaitu:

“Pertama, Industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya, berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik; industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.”

Sementara pengertian industri dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang-barang. Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri merupakan perusahaan atau pabrik yang didalamnya terdapat kegiatan yang produktif yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dan dalam pengembangan perusahaan tersebut dipengaruhi lingkungan bisnis itu sendiri.

2.6.2 Klasifikasi Industri

Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu

berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah sebagai berikut;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 19 M/SK/1986, Industri diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Industri kimia dasar, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contoh : industri kertas, semen, pupuk, selulosa dan karet.
- b. Industri mesin dan logam dasar, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi. Contoh : industri elektronika, mesin, pesawat terbang, perkakas, alat berat.
- c. Aneka industri, yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen. Contoh : industri pangan, tekstil, kimia dasar, aneka industri bahan bangunan.
- d. Kelompok industri kecil, yaitu industri dengan modal kecil atau peralatan yang masih sederhana. Contoh : industri rumah tangga.

Dalam penjabaran yang lebih luas, Industri bisa diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan.
- b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasilhasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain.
- c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata.

2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.
- b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada

hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.
- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
- b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau

digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil.

- c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

4. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya: industri minyak goreng, Industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan.
- b. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM (bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintetis.
- c. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya: industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni dan hiburan.

5. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri berorientasi pada pasar (market oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.
 - b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (employment oriented industry), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.
 - c. Industri berorientasi pada pengolahan (supply oriented industry), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).
 - d. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu.
 - e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (footloose industry), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas.
- Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja,

dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

6. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.
- b. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.

7. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan.
- b. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman.

8. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan

Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri). Misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman.
- b. Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan.
- c. Industri dengan modal patungan (join venture), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA. Misalnya: industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.

9. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan.
- b. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi.

10. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjaanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.
- b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.
- c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa metode memiliki arti sebagai “cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal pengetahuan” (Daryanto, 1997:439). Sedangkan metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *methods* yang berarti cara atau jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya sehingga dapat memahami objek yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah.

Riset (penelitian) adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencapai kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara sistematis serta sempurna terhadap permasalahan. Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang disusun secara teratur untuk mencapai tujuan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian tersebut sangat berguna dan penting dalam proses pengumpulan data, yang dalam hal ini adalah data tentang strategi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Pengembangan Industri di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan arah dan kegiatan serta dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena berupa upaya untuk mengungkapka suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yaitu menggambarkan bagaimana proses kegiatan yang sedang berlangsung dalam Pengembangan kawasan industri di kabupaten Nganjuk. Disamping itu penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penjelasan data saja, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikannya.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008:6).

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Lexi J Moleong fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang

bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila keduanya ditempatkan secara bebasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan (Moleong, 2008:93).

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian. Penetapan fokus penelitian, memudahkan pembatasan fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Nganjuk sebagai implementasi kebijakan
2. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk
 - a. Perubahan Sosial Masyarakat;
 1. Pergeseran Jenis Pekerjaan dan Gaya Hidup
 2. Pertumbuhan Migrasi, dan Pola Interaksi Masyarakat
 - b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat;
 1. Daya Beli Masyarakat
 2. Kepemilikan Benda Fisik

2. Upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkan akibat pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat peneliti menuangkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah/daerah tempat fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Lokasi yang akan dijadikan penelitian ini berada di Kabupaten Nganjuk.

Situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data atau informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka situs penelitian pada penelitian ini meliputi :

1. Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk
2. Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
3. Kawasan Sekitar Industri berdiri di Kecamatan Bagor.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian adalah didasarkan pada aspek kemudahan dalam akses informasi. Selain itu juga alasan penelitian menentukan lokasi di Kabupaten Nganjuk adalah karena Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten kecil di Jawa Timur dengan luas wilayah hanya 1.224 km² dan sedang giat mengembangkan kawasan industri besar didaerahnya. Pemilihan situs penelitian di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu karena Kantor tersebut merupakan pelaksana teknis perizinan pendirian industri dan lembaga yang menaungi permasalahan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, dan di tiga

kecamatan yang sudah disebutkan diatas karena pada kecamatan tersebut merupakan daerah yang paling terlihat pembangunan industrinya. Maka dari itu dengan pemilihan lokasi penelitian pada Kabupaten Nganjuk dan situs penelitian pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan daerah atau kawasan berdirinya industri Kabupaten Nganjuk diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi mendalam, jelas dan terinci.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Loftland dalam Moleong (2008:157), Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada lokasi dan situs penelitian di atas.

Oleh karena itu maka peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan. Dalam menentukan informan atau narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu teknik memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam populasi dengan beberapa pertimbangan tertentu yang

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Purposive sampling pada dasarnya menentukan informan yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan meliputi sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria sampel tertentu.

2. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan penerimaan daerah melalui sektor minyak dan gas. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.
3. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak kebijakan pengembangan kawasan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Berkaitan dengan hal tersebut, jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2008). Data primer harus dicari melalui

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer (*Informan*) adalah :

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk
2. Kepala Desa Guyangan Kecamatan Bagor
3. Beberapa Masyarakat sekitar kawasan Industri Yang bekerja sebagai karyawan Pabrik
4. Beberapa masyarakat sekitar karyawan Industri yang Bukan merupakan Karyawan Pabrik

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang material original yang mana data sekunder juga disebut “*second hand information*”. Dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara

gabungan daripadanya. Pengumpulan data harus dilakukan untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan bahwasanya wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan/tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dan juga mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti berhadapan secara langsung dengan informan untuk wawancara sehingga peneliti mampu mendapatkan informasi yang relevan dengan objek yang diteliti. Informan yang diwawancarai adalah Kepala dan bagian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, Kepala Kelurahan Guyangan, dan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang telah ditentukan sebagai narasumber. Wawancara dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi diperkirakan kurang lebih 1 jam per informan. Jumlah informan per lokasi/tempat sebanyak 1 hingga 2 orang. Sehingga jumlah total per informan adalah sebanyak 1 hingga 2 orang per 1 jam yang dilakukan selama 2-3 kali dalam

seminggu. Sedangkan alat bantu yang digunakan pada saat wawancara adalah alat perekam suara dan alat tulis.

2. Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penelitian guna memperoleh data yang akurat dari sumber data. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat segala fenomena yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui Dampak pengembangan kawasan industri terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang dilakukan di Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor, dan di sekitar kawasan berdirinya industri di Kecamatan Bagor. Observasi dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi diperkirakan 2 jam pada saat observasi tersebut. Alat bantu yang digunakan pada saat observasi berupa kamera dan alat tulis.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian dan dari pendapat-pendapat para ahli berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung peneliti dalam membuktikan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga setiap fenomena yang terjadi dilapangan mampu didokumentasikan dengan baik dan lengkap. Dokumentasi yang dilakukan disetiap kegiatan peneliti pada saat

melakukan penelitian didapatkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dan Kantor Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor. Dengan dokumen berupa peraturan daerah, RPJMD, *Booklet*, serta data dari literatur atau artikel yang terkait yang sudah disebutkan dalam data primer dan sekunder.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama, berikut instrumen penelitian, antara lain :

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan panduan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti ketika melakukan pengamatan, wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilakukan. Tujuannya agar terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati.

3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan menggunakan kamera digital, alat perekam, alat tulis, fotokopi, dan peralatan lain yang dapat digunakan pada saat penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2014:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan kawasan Industri. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan mengenai 3 alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang meliputi:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

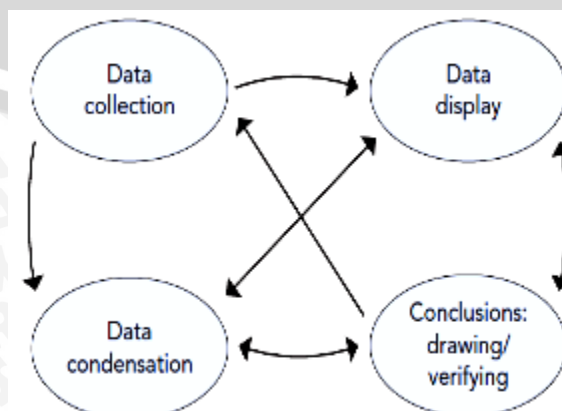
Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan yang lainnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian, penyatuan informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dan makna benda-benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun model analisis data interaktif adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Komponen Analisis Data : Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana 2014 :14



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Nganjuk

4.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat $111^{\circ} 50' - 112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 122.433,1 ha dengan batas-batas wilayah administrasi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar dalam 3 wilayah dataran yaitu 91.144,5 ha (74,44%) terletak di dataran rendah, 25.267,4 ha (20,64%) di dataran sedang dan 6.021,2 ha (4,92%) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, Sebagian Kecamatan Loceret dan Pace Sedangkan di bagian utara yaitu kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk perkecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut ;

Tabel 4.1
Ketinggian, Luas Wilayah dan Jenis Tanah Kabupaten Nganjuk
Perkecamatan

	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan laut	Jenis Tanah			
			Sawah	Kering	Hutan	Jumlah Total
1	Sawahan	750	1.117,0	1.554,9	7.916,7	11.588,6
2	Ngetos	500	1.588,0	1.822,8	2.612,4	6.021,2
3	Berbek	85	2.005,9	1.173,6	1.650,2	4.830,0
4	Loceret	63	2.766,5	1.968,9	2.134,1	6.869,2
5	Pace	60	2.794,7	1.884,4	166,6	4.845,7
6	Tanjunganom	47	4.028,8	3.055,4	0	7 084.2
7	Prambon	56	2 442.2	1 673.6	0	4 115.8
8	Ngronggot	45	1 979.2	3 319.3	0	5 298.5
9	Kertosono	40	1 194.6	1 072.9	0	2 267.5
10	Patianrowo	46	1 929.5	1 629.8	0	3 559.3
11	Baron	46	2 115.3	1 564.9	0	3 680.2
12	Gondang	60	3 544.4	2 176.2	3 873.7	9 594.3
13	Sukomoro	54	2 742.1	796.7	0	3 538.8
14	Nganjuk	56	1 194.4	1 064.2	0	2 258.6
15	Bagor	70	2 355.4	1 155.6	1 604.3	5 115.3
16	Wilangan	103	1 132.5	598.5	3 332.9	5 063.9

17	Rejoso	62	4 310.6	1 489.2	9 366.5	15 166.3
18	Ngluyu	155	1 036.5	929.1	6 649.3	8 614.9
19	Lengkong	40	1 604.8	1 156.2	5 956.3	8 717.3
20	Jatikalen	52	1 106.0	1 353.5	1 744.0	4 203.5
Jumlah/Total			42 986.4	32 439.7	47 007.0	122 433.1

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2013 dalam RPJMD Nganjuk 2014-2018

4.1.1.2. Topografi dan Geologi

Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi, sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2,300 m DPL, potensial untuk tanaman perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 39-140 m DPL, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Bagian utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur. Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 meter sampai 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan empat kecamatan berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150 meter sampai 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan.

Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah berdasarkan

pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di seluruh kecamatan-kecamatan, jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah alluvial di dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu

4.1.1.3. Hidrologi dan Klimatologi

Secara umum curah hujan di Kabupaten Nganjuk tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni sampai dengan September/Oktobre terjadi musim Kemarau dan pada bulan Nopember/Desember sampai bulan Mei mengalami musim penghujan. Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju Kota Nganjuk, karena itu pula Kota Nganjuk dikenal dengan sebutan kota angin.

Tabel 4.2

Lokasi Dan Banyaknya Hari Hujan Perkecamatan 2012

	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan laut	Banyaknya Curah Hujan (MM)			
			2009	2010	2011	2012
1	Sawahan	750	1413	3669	2421	1868
2	Ngetos	500	1805	3563	2056	1946
3	Berbek	85	1459	2772	1569	2256

4	Loceret	63	1182	2180	1419	2264
5	Pace	60	1470	2846	1666	2183
6	Tanjunganom	47	1636	2752	1866	1352
7	Prambon	56	1501	2643	1490	1373
8	Ngronggot	45	1639	2522	1299	1087
9	Kertosono	40	2099	2702	1609	963
10	Patianrowo	46	-	-	-	-
11	Baron	46	-	-	-	-
12	Gondang	60	1025	3008	2114	1215
13	Sukomoro	54	-	-	-	-
14	Nganjuk	56	1091	2656	1508	1687
15	Bagor	70	1223	2273	928	-
16	Wilangan	123	1081	2388	1240	1323
17	Rejoso	62	1674	2586	1869	1430
18	Ngluyu	155	1837	780	709	1500
19	Lengkong	40	1492	2621	1678	1223
20	Jatikalén	52	1821	2078	1856	1600

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2013

4.1.1.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah

122.433,1 ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan dan 264 desa dan 20 kelurahan. Tata guna tanah awal tahun 2012 wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi daerah kering 32.439,7 ha meliputi pemukiman seluas 15.344 ha (12,53%), tegal seluas 14.432 ha (11,79%) ; perkebunan seluas 260 ha (0,21%); lahan sawah seluas 43.000 ha (35,2%); hutan seluas 47.007 ha (38,39%); dan lainnya seluas 2,395 ha (1,96%). Penggunaan lahan di Kabupaten Nganjuk dapat diklasifikasikan menjadi kampung/pemukiman, kebun campur, sawah, tegalan, hutan, tanah tandus, dan penggunaan lahan lain-lain. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah, namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan keersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Selain itu wilayah Kabupaten Nganjuk yang berupa Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga keseimbangan alam. Disamping itu hutan juga dapat dieksplorasi sehingga memberi manfaat ekonomi, sebagai hutan produksi.

Luas lahan kritis tahun 2012 sebesar 7.670 ha. Lahan kritis tersebut dikelompokkan dalam empat tingkat kekritisannya, yaitu potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Lahan kritis di Kabupaten Nganjuk tahun 2012 tersebar di 12 kecamatan, terdiri dari lahan berpotensi kritis seluas 152 ha, lahan agak kritis

seluas 1.281 ha, lahan kritis seluas 5.572 ha dan ber kriteria sangat kritis seluas 665 ha. Lahan kritis terluas berada di Kecamatan Sawahan dengan luas 1.314 ha yang berada pada ketinggian rata-rata 750 mdpl. Luas lahan kritis di kecamatan Ngetos mencapai 926 ha yang berada pada ketinggian rata-rata 550 mdpl dan di Kecamatan lain hanya pada rentang 200-400 ha dengan rata-rata 60 mdpl. Dibandingkan dengan data tahun 2010, terjadi penurunan lahan kritis yang cukup signifikan yaitu dari 9105 ha menjadi 7670 ha. Hal ini menunjukkan lahan kritis sudah dapat difungsikan menjadi lahan yang potensial untuk lebih produktif dengan usaha diversifikasikan lahan.

4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Nganjuk

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2012 sebesar 1,025,513 jiwa, dengan perincian 508,456 jiwa penduduk laki - laki dan 516,94 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1,000,132 jiwa pada tahun 2008 menjadi 1,025,513 pada tahun 2012, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata-rata sebesar 0.56 persen

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Tingkat pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2008	501.688	498.444	1.000.132	0,27%	817
2009	496.351	506.179	1.002.530	0,24%	819

2010	505.265	511.128	1.017.030	1,45%	831
2011	508.923	513.829	1.022.752	0,56%	835
2012	508.567	516.946	1.025.513	0,27%	837

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2013

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa secara jumlah maka penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon, sedangkan yang terkecil dimiliki kecamatan Ngluyu, Jaticalen dan Wilangan. Bila dilihat dari kepadatan penduduk yang ada maka Kecamatan Nganjuk sebagai pusat kecamatan kota menjadi kecamatan terpadat, disusul Kecamatan Kertosono dan Prambon.

Tabel 4.4

Jumlah Persebaran Penduduk per Kecamatan

	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk Tahun		
			2010	2011	2012
1	Sawahan	11 588.6	36.015	36.218	36.315
2	Ngetos	6 021.2	34.112	34.304	34.396
3	Berbek	4 830.0	53.732	54.035	54.179
4	Loceret	6 869.2	68.909	69.296	69.484
5	Pace	4 845.7	58.983	59.314	59.476
6	Tanjunganom	7 084.2	108.631	109.242	109.538

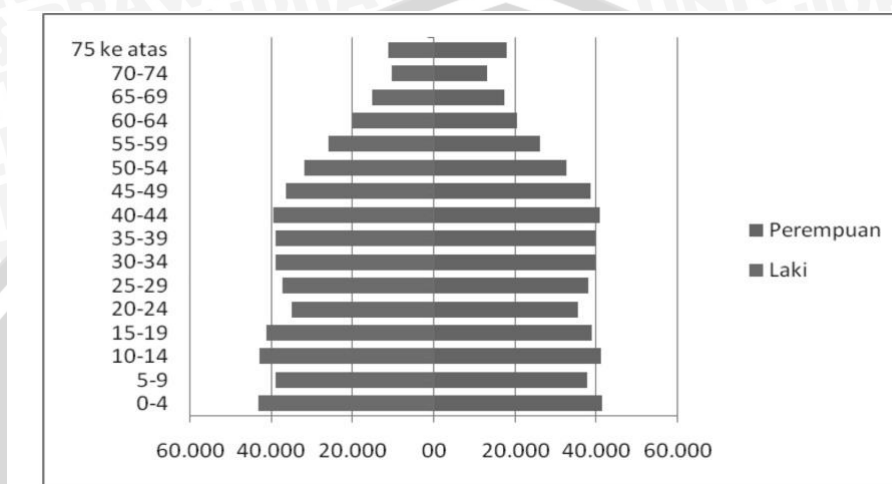
7	Prambon	4 115.8	68.524	68.909	69.095
8	Ngronggot	5 298.5	75.084	75.507	75.708
9	Kertosono	2 267.5	52.405	52.700	52.843
10	Patianrowo	3 559.3	40.890	41.120	41.231
11	Baron	3 680.2	48.069	48.340	48.469
12	Gondang	9 594.3	50.027	50.309	50.444
13	Sukomoro	3 538.8	41.566	41.800	41.912
14	Nganjuk	2 258.6	65.917	66.287	66.470
15	Bagor	5 115.3	56.753	57.072	57.227
16	Wilangan	5 063.9	26.910	27.061	27.135
17	Rejoso	15 166.3	66.167	66.539	66.720
18	Ngluyu	8 614.9	13.688	13.765	13.801
19	Lengkong	8 717.3	31.212	31.388	31.472
20	Jatikalén	4 203.5	19.436	19.546	19.598
	Jumlah	122 433,1	1.017.030	1.022.752	1.025.513

Sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013

Hasil Sensus Penduduk tahun 2012 menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh penduduk muda dan dewasa. Namun demikian komposisi penduduk anak-anak dibawah 14 tahun masih cukup tinggi yaitu 24.62 persen. Sedangkan penduduk pada kelompok umur 20–24 tahun mengalami penurunan, hal ini bisa dijelaskan karena sebagian penduduk pada kelompok umur tersebut tinggal diluar wilayah Kabupaten Nganjuk baik untuk

bekerja maupun melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut dibawah :

Grafik 4.1
Grafik Struktur Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



Sumber: RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014-2018

Jenis Pekerjaan dan Pendidikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, persentase jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut : pertanian sebesar 51,73%, pertambangan dan penggalian 1,54%, industri sebesar 8,14%, listrik gas dan air minum 0,07%, konstruksi 4,52%, perdagangan, rumah tangga dan jasa akomodasi sebesar 20,98%, transportasi, pergudangan dan komunikasi 2,49%, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 0,57%, jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan 9,95%.

Berdasarkan hasil survei susenas Tahun 2012 pendidikan sebagian besar penduduk Kabupaten Nganjuk 33,46% berijazah SD/SDLB/MI, berijazah SMP/MPLB ada 19,05%, berijazah SMU/SMULB ada 11,24%, dan ijazah SMK

ada 6,54%, Penduduk yang berijazah Perguruan Tinggi (D.1 samapai S.3) hanya 5,32%. Sementara 24,39% penduduk tidak memiliki ijazah.

4.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Sehingga kawasan strategis di wilayah kabupaten ditentukan berdasarkan sudut kepentingan yang meliputi; pertumbuhan ekonomi; sosial dan budaya; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi :

- i. Kawasan Strategis agropolitan lingkaran wilis ditetapkan di kawasan Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Loceret
- ii. Kawasan Strategis perbatasan Jombang-Nganjuk-Kediri
- iii. Kawasan jalur jalan Jembatan Kelutan (Nganjuk)-Papar (Kediri);
- iv. Kawasan Agropolitan sukomo dan Sekitarnya; dan
- v. Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri.

b. Kawasan strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, meliputi :

- i. Canddi Lor di Desa Candirejo Kecamatan Loceret;
- ii. Candi Ngetos di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos;

- iii. Masjid Al-Mubarak dan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Kacangan Kecamatan Berbek;
 - iv. Makam Syekh Sulukhi berada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan;
 - v. Monumen Jendral Soedirman berada di Desa Bajulan Kecamatan Lceret;
 - vi. Monumen dan Museum Dr. Sutomo berada di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret;
 - vii. Museum Anjuk Ladang berada di Kota Nganjuk
 - viii. Pura Kerta Bhuwana Giri Wilis berada di Desa Bajulan Kecamatan Loceret.
- c. Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan sub DAS Widas, kawasan rawan bencana alam dan bencana gunung berapi berada di Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan sebagian di Kecamatan Rejoso.

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Pengembangan Kawasan Industri

4.2.1.1 Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri

Dasar kebijakan pengembangan kawasan industri di kabupaten Nganjuk sebenarnya sulit untuk ditentukan karena pelaksanaan pengembangan kawasan industri ini bukan melalui surat perintah atau surat keputusan yang ditujukan kepada salah satu instansi dinas atau badan/kantor untuk melakukan

pembangunan tersebut, tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal yang melibatkan banyak instansi untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Pernyataan ini didasarkan pada Penjelasan Agung yang merupakan Kepala Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

"Sebenarnya kita tidak bekerja atau mengerjakan satu hal saja (pengembangan kawasan industri) ya, kan disini sifatnya kita pelayanan, tugas utama kita melayani investor maupun warga Nganjuk yang ingin mendirikan perusahaan, sama nyusun kebijakan tentang pengembangan kawasan industri ini bareng sama Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sama Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), sama administrasi lainnya lah. Dasar hukumnya ya SK bupati tentang tupoksi dari BPPT itu sendiri. Kalo acuan iya Perda Nomor 1 Tahun 2012 itu." (wawancara tanggal 9 Agustus 2016 di Kantor BPPT)

Hal senada juga di ungkapkan oleh Sumadji Kepala Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor yang merupakan salah satu Kepala Kelurahan yang di Desa/Kelurahannya didirikan pabrik. Beliau mengungkapkan ketidaktahuannya terkait dasar kebijakan pengembangan kawasan industri tersebut.

"Saya kurang tahu ya kalau masalah dasar kebijakannya, saya kan baru disini, dan pas saya mulai kerja disini pabriknya sudah mulai beroperasi, mungkin pak carik yang tahu surat-surat perizinannya dari BPPT sama datanya, ada disimpan Pak Carik semua kalo surat-surat izinnya dari BBPT sama apa itu kemaren, oh iya amdal nya juga.. Sama salinan akta tanah yang dibeli sama pabriknya itu. (wawancara 11 Agustus 2016 di Kantor Kelurahan Guyangan, Bagor, Nganjuk)"

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dasar kebijakan dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk

adalah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 yang diimplementasikan oleh BPPT dalam bentuk penerbitan surat-surat perizinan pendirian perusahaan.

4.2.1.2 Proses Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Nganjuk

Proses pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk mulai bergerak dengan cepat setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal mulai diberlakukan, dengan jelasnya regulasi yang mengatur tentang penanaman modal para investor yang menanamkan modal dan mendirikan perusahaan di Kabupaten Nganjuk meningkat secara signifikan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Tata Usaha Badan Pelayanan Perizina Terpadu Kabupaten Nganjuk yang menyatakan sebagai berikut :

"Ya, bisa dikatakan seperti itu, soalnya sebelumnya kita hanya melayani perizinan usaha dengan skala sedang sampai menengah, setelah perda itu (diterbitkan) banyak perusahaan-perusahaan yang lebih besar (yang mengurus perizinan)."

Pengembangan kawasan industri ini tidak dipusatkan di satu daerah saja, melainkan di beberapa tempat strategis di beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Pembangunan Tol Solo-Surabaya menjadi katalisator cepatnya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, peningkatan secara drastis dimulai di akhir tahun 2014 sampai 2015, terlihat dengan banyaknya didirikan industri pengolahan atau pabrik di sepanjang jalur utama Solo - Surabaya. seperti di jelaskan oleh Agung Kepala TU BPPT Kabupaten Nganjuk :

"Pembangunan jalan tol nantinya jelas mempengaruhi keberadaan pabrik di Kabupaten Nganjuk, mudahnya akses pemasaran yang jelas nanti kalau tol nya sudah jadi. Tapi sekarang saja juga sudah banyak pabrik terutama di sepanjang jalan besar Surabaya-Solo.(Wawancara 9 Agustus 2016)"

Proses pengembangan industri ini dimulai dari pihak perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan di kaantor BPPT dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan (lihat di booklet BBPT). Alur perijinan secara umum sudah disosialisasikan di media online, booklet, maupun terdapat langsung di BPPT Kabupaten Nganjuk seperti gambar berikut:



Gambar 4.1

Mekanisme Pelayanan Perizinan BPPT Kabupaten Nganjuk

Sumber : Dokumentasi Penulis

Untuk perizinan Usaha Penanaman Modal (berbagai sektor usaha) yang dalam hal ini di khususkan pada pendirian pabrik/usaha industri sendiri yaitu izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) kurang lebih mekanisme yang di jelaskan oleh pihak BPPT adalah sebagai berikut:

"sebelum melakukan izin gangguan dan izin mendirikan bangunan pihak investor atau manajemen pabriknya sudah melakukan *deal-dealan* sama yang punya tanah sebelumnya jadi nanti di belakang nggak ada sengketa, masalah sertifikat tanah dan semacamnya mereka sendiri yang urus, nah baru setelah itu menyerahkan berkas-berkas perizinan ke BPPT nanti setelah itu tim teknis akan mensurvey AMDAL nya dan kalau lolos baru terbit surat izinnya, mungkin sebenarnya sederhana ya prosesnya tapi yang butuh waktu agak lama itu di analisisnya (Wawancara dengan Agung selaku Kepala BPPT Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Agustus 2016)"

Seperti yang disebutkan dari persyaratan-persyaratan terkait izin pendirian usaha penanaman modal BPPT memiliki tim teknis yang melakukan survey dan AMDAL, adapun alur perizinan dan persyaratan terlampir.

4.2.2 Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk

4.2.2.1 Perubahan Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Guyangan dapat ditunjukkan diantaranya melalui jenis pekerjaan, gaya hidup, dan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik. Selain itu juga bisa dilihat dalam pertumbuhan migrasi dan interaksi masyarakat.

1. Pergeseran Jenis Pekerjaan dan Gaya Hidup

Mengacu pada data RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 selama tahun 2008 sampai 2012 sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) namun selama kurun waktu tersebut juga sektor pertanian juga

mengalami penurunan kontribusi, di tahun yang sama sektor industri hanya menempati peringkat ketiga setelah pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran, namun kontribusinya meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut juga menggambarkan peralihan bidang pekerjaan yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Di Kelurahan Guyangan sendiri pada tahun tersebut masih terkenal dengan lokalisasinya yang ramai. Dan dengan predikat tempat lokalisasi kebanyakan warga kelurahan Guyangan bekerja sebagai pemandu karaoke, Pekerja Sex Komersial, dan tempat hiburan semacamnya. Seperti di jelaskan oleh Bapak Sumadji Kepala Kelurahan Guyangan ;

"Dulu kebanyakan disini itu pemandu karaoke mas, ya yang masih muda sampe yang agak tuaa juga ada, *purel* itu lho mas kalo anak-anak muda sekarang bilang." (wawancara Tanggal 11 Agustus 2016 di Kantor Kelurahan Guyangan)

Tidak diberikan keterangan yang jelas berapa jumlah usaha hiburan malam dan pekerja yang tinggal di kelurahan Guyangan, karena sebagian besar dari mereka adalah pendatang dari luar kota dan biasanya menetap tidak lebih dari tiga bulan, berikut Bapak Sumadji menjelaskan beberapa alasannya;

"kalau yang muda-muda itu nggak pasti ya mas, soalnya mereka nggak yang sampai tinggal lama dan bikin KTP disini, kalau *mami* nya ya biasanya orang-orang udah pada kenal lah. Paling tiga bulan - enam bulan, ya paling lama setahun lah, ntar ada razia pindah ke lokasi lain, trus di lokasi lain ada razia pindah kesini, atau kalau engga ikut orang, ya gitu terus."(wawancara tanggal 11 Agustus 2016 di Kelurahan Guyangan)

Sealin Pekerja Sex Komersial (PSK) tentu saja ada warga atau penduduk asli Kelurahan guyangan yang bekerja sebagai petani, pedagang, PNS, dan POLRI maupun pekerjaan swasta lainnya, dengan jumlah yang bervariasi.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di implementasikan, beberapa Industri Pengolahan mulai ramai didirikan di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk, beberapa di antaranya adalah PT. Langgeng Jaya Makmur, PT. Langgeng Jaya Makmur merupakan salah satu anak perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (Sampoerna) di Kabupaten Nganjuk yang terletak Jl. Dipoyono No. 14 Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor. PT Langgeng Jaya Makmur adalah Mitra Produksi Sigaret Sampoerna atau biasanya orang sekitar menyebutnya dengan MPS. MPS Bagor berdiri pada tahun 2004 dan sekarang memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.050 orang. Sekitar lima ratus meter ke arah barat dari MPS Bagor berdiri pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia. Dibandingkan dengan MPS Bagor, pabrik ini masih baru. PT. Kharisma Baru Indonesia mulai beroperasi di akhir tahun 2014.

Berdirinya pabrik di kelurahan Guyangan tidak serta merta mempengaruhi pergeseran jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Guyangan secara besar-besaran, kebanyakan yang bekerja di pabrik-pabrik tersebut adalah mantan pekerja pabrik yang dulu bekerja di Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya. Sementara sebagian kecil lainnya adalah masyarakat kelurahan Guyangan yang dulunya bekerja sebagai buruh tani, dan belum

pernah bekerja atau masyarakat usia produktif yang baru lulus sekolah menengah atas/kejuruan. Seperti dijelaskan Oleh Sumadji

"Setahu saya mas ya, *purel-purel* itu nggak ada yang pindah kerja ke pabrik, paling kebanyakan ya orang-orang yang masih nganggur dirumah itu sama anak-anak yang baru lulus SMA"(wawancara 11 Agustus 2016)

Hal tersebut dibenarkan ooleh Lilah (18) yang merupakan karyawan dari PT Kharisma Baru Indonesia. Lilah baru menyelesaikan studinya di Madrasah Aliyah Bagor dan bekerja di pabrik sepatu tersebut setelahnya, ditemui ketika pulang kerja, Lilah mengatakan;

"ya mumpung ada ini mas deket rumah, mbak sama mas juga kerja di pabrik, tapi di Pasuruan sama Surabaya"(wawancara 24 Agustus 2016)

Beberapa pernyataan yang mendukung juga diungkapkan oleh beberapa karyawan pabrik yang ditemui seusai jam kerja. Nur Kholifah (25) merupakan karyawan pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia, Nur adalah warga asli kelurahan Guyangan, setelah lulus dari SMK pada tahun 2010 Nur bekerja di Maspion selama 4 tahun lalu mengundurkan diri dan pulang ke Nganjuk dan bekerja di PT Kharisma Baru Indonesia karena jarak yang lebih dekat dengan rumah. Meskipun UMR nya jauh berbeda dengan Surabaya, Nur mengaku memilih pulang ke Nganjuk karena ingin sekalian merawat Ibunya di rumah.

"saya disana juga kerja disini juga kerja, Cuma kalo disini kan saya lebih tenang dirumah sendiri, sama ngerawat emak, soalnya mas saya juga merantau jauh, kasian kalo orang tua dirumah sendiri. Yah nggak pa pa gajinya lebih dikit dari surabaya, tapi

mas kan juga ngirimin tiap bulan, saya yang perempuan bantu-bantu dirumah sekalian"(wawancara 25 Agustus 2016)

Sementara Devi Puspitasari (18) yang merupakan anak dari petani bawang merah dulunya ikut membantu ayah dan ibunya mengerjakan sawah bawang merahnya;

"saya dulu habis lulus SMK itu bantuin pitil brambang dulu mas, ya nggak pas lulus sekolah aja sih mas, pas saya sekolah juga udah bantuin ngirim di sawah, kalo lagi panen juga ikut pitil brambang" (wawancara 25 Agustus 2016)

Nararumber juga menyatakan bahwa beberapa temannya yang dulunya ikut berkebun dan bertani ada beberapa yang sekarang ikut bekerja di pabrik sepatu.

Hal senada juga di ungkapkan Salbiyah (32), yang merupakan warga Kecamatan Wilangan yang terletak disebelah kecamatan Bagor;

"saya dulu lama bantu-bantu di rumah tetangga mas, ngerawat anaknya soalnya bapak ibunya kerja, sekalian bersih-bersih, nyuci sama setrika" (wawancara 24 Agustus 2016)

Selain pergeseran secara langsung dari luar ke dalam pabrik (internal) pergeseran pekerjaan juga terjadi di sekitar pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia, mulai dari dibukanya toko kelontong, jasa penitipan sepeda motor, kos-kosan dan laundry. Seperti penjelasan Sumartiah (54) pemilik kos-kosan sekaligus pemilik toko kelontong yang terletak di seberang pabrik;

"Ini sebenrnya rumah pakde saya dulu, trus sebelum pabrik ini dibuka ini dulu gudang nggak dipake, *eman* mas kan di pinggir

jalan, trus saya *susuk'i*, lha pas pabrik nya selesei ya sudah saya buka toko sekalian sama kos-kosan di atas, kalo rumah saya sendiri di Kerep (Kerepkidul) situ" (wawancara 24 Agustus 2016)

Tepat disebelah toko milik Sumartiah, Hardi (47) membuka halaman depan rumahnya yang cukup luas untuk membuka jasa penitipan sepeda motor yang tidak disediakan oleh pihak pabrik;

"Lumayan mas buat ceperan, ya kalo saya sendiri udah kerja sebenarnya di koperasi di Nganjuk, istri kan dirumah bisa jagain, paling kalo pagi pas karyawannya datang itu jam enam sampe tujuh, saya habis itu berangkat, ditungguin istri, nanti jam 3 waktunya karyawan pulang, kalo saya belum pulang ada istri saya sama adek saya yang bantuin" (wawancara 24 Agustus 2016)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan industri berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat sekitar, salah satunya adalah terjadinya pergeseran jenis pekerjaan yang terlihat dari pekerjaan beberapa orang sebelum berdiri atau beroperasinya pabrik tersebut dan ketika pabrik tersebut sudah beroperasi. Seperti dari pembantu rumah tangga menjadi karyawan pabrik, pensiunan membuka usaha perdagangan persewaan kos, serta usaha sambilan jasa penitipan sepeda motor. Pergeseran yang terjadi tidak secara besar-besaran baik secara langsung di dalam pabrik itu sendiri maupun di daerah sekitar pabrik.

Dengan bergesernya jenis pekerjaan, hal tersebut juga mempengaruhi pendapatan dan gaya hidup sehari-hari karyawan pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia maupun warga sekitar pabrik. Seperti yang disampaikan Lilah (18) ;

"hehe, ya dulu kalo mau beli apa-apa saya masih minta bapak sama mbak, sekarang kan udah kerja, Alhamdulillah udah bisa beli apa-apa sendiri, malah bisa ngasih jatah bapak, mbak sama mas juga masih ngasih jatah bapak "(wawancara 24 Agustus 2016)

Hal senada juga di ungkapkan Devi (18) yang masih tinggal dengan kedua orang tuanya dan sebelumnya sehari-hari bergantung dengan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya;

"Kalo saya ya buat jajan sendiri mas, bapak sama ibuk udah banyak kok duitnya, haha" (wawancara 25 Agustus 2016)

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Nur (25) yang meski tinggal dengan orang tua tetapi tidak bergantung dengan penghasilan orang lain dan justru menjadi tulang punggung keluarga;

"sama aja sih mas, dulu saya di Surabaya tapi mas serabutan dirumah, sekarang gantian mas yang di Kalimantan saya di Nganjuk, ya lebih banyak dikit lah buat tabungan" (wawancara 25 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Salbiyah (32) yang tinggal dengan orang tuanya tetapi menjadi tulang punggung keluarga;

"mungkin bedanya sekarang saya nggak terlalu sering hutang tetangga ya mas, soalnya penghasilannya pasti, jadi saya bisa ngitung-ngitung, kalo dulu nggak pasti, jadi ya tombok di belakang biasanya, pinjem tetangga" (wawancara 24 Agustus 2016)

Dari pernyataan keempat karyawan pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan berubahnya pekerjaan mempengaruhi juga

pendapatan yang memengaruhi gaya hidup. Beberapa karyawan yang masih muda dan tinggal dengan orang tuanya tidak lagi bergantung dengan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, dan salah satu karyawan sudah mengurangi frekuensi pinjam uang ke tetangganya.

Selain dampak langsung yang dirasakan masyarakat yang bekerja di pabrik, imbasnya juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Seperti yang dirasakan oleh Sumartiah (54) sebagai pemilik kos-kosan di sekitar pabrik, dia menyampaikan hal berikut;

"Alhamdulillah mas buat kesibukan, kebetulan saya kan pensiunan, jadi biar ada kegiatan, ya penghasilannya buat ngasih sangu buat cucu" (wawancara 24 Agustus 2016)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Hardi (47) yang memiliki usaha jasa penitipan sepeda motor yang terletak di depan pabrik sepatu PT. Kharisma Baru Indonesia;

"lumayan mempengaruhi mas, soalnya istri kan nggak kerja, trus sekarang nungguin parkir, sehari bisa dapet dua ratus sampe tiga ratus ribu, buat tambah belanjaan lumayan lah" (wawancara 24 Agustus 2016)

Selain kos-kosan dan toko serta jasa penitipan motor terlihat juga usaha baru seperti laundry, dan usaha warung makan yang buka setelah pabrik-pabrik tersebut beroperasi.

2. Pertumbuhan Migrasi dan Interaksi Masyarakat

Pengaruh atau dampak lain yang terjadi akibat dari pengembangan industri di Kabupaten Ngannjuk adalah meningkatnya jumlah penduduk akibat migrasi. Dengan dibukanya lapangan pekerjaan hal tersebut

menarik masyarakat didalam kabupaten Nganjuk maupun luar kabupaten Nganjuk. Namun nampaknya hal ini tidak terakomodir dengan jelas, seperti tidak adanya data yang jelas mengenai berapa jumlah usaha kos-kosan yang ada di Guyangan dan data warga yang menempati kos tersebut. seperti yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Guyangan, Sumadji menjelaskan :

"disini banyak kosan, tapi kita nggak bisa mengidentifikasi siapa yang ngekos disitu karyawan MPS, apa anak-anak pemandu lagu atau purel itu lho mas, tapi ya yang nomer satu itu karyawan MPS itu mas" (wawancara 11 Agustus 2016)

Pernyataan tersebut didukung oleh Sumartiah (54) sebagai pemilik kos-kosan di dekat pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia;

"Disini yang ngekos itu ada lima, kamarnya ada enam jadi ini masih kosong satu, yang satu itu dari Saradan (Madiun), yang dua dari Ngronggot (Nganjuk) sama yang satu dari Kertosono (Nganjuk), satu lagi itu keponakan saya sendiri dari Rejoso (Nganjuk) sana yang deket Bojonegoro. Itu semua kerja di pabrik sepatu itu" (wawancara 24 Agustus 2016)

Dari beberapa pernyataan diatas semua narasumber yang diwawancari terkait masalah peningkatan penduduk menjustifikasi bahwa terjadi perpindahan penduduk dari luar kabupaten ke dalam Kabupaten Nganjuk khususnya ke Kelurahan Guyangan, namun ketika diminta data riil berupa data penduduk narasumber tidak bisa memberikan data tersebut. Hal ini dikarenakan karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai sistem dari pendataan warga itu sendiri, sehingga sulit untuk mendeteksi berapa jumlah orang yang pindah masuk kedalam Kelurahan Guyangan, seperti yang biasa dilakukan dikota-kota yang lebih besar yaitu dengan mengisi formulir

data diri penghuni kosan untuk memudahkan pelaporan pemilik kosan kepada RT/RW atau kelurahan setempat.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kelurahan Guyangan ternyata tidak terlalu membawa perubahan sosial terkait interaksi masyarakat, terutama antara pihak pabrik dengan masyarakat, seperti yang di ungkapkan kepala Kelurahan Guyangan Sumadji;

"nggak ada sih mas, itu MPS aja dimintai sponsor buat PHBN (17 Agustus) nggak ngasih kita, malah yang toko-toko kecil itu bisa ngasih lima ratus ribu" (wawancara 11 Agustus 2016)

Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan masyarakat sekitar pabrik, Sumartiah (54) menyatakan;

"Oh nggak ada mas, paling yang kemarin aja itu pas pembukaan, ya bukan di undang istilahnya, itu masyarakat datang aja ikut slamatan, habis itu nggak ada" (wawancara 24 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Hardi yang mengungkapkan hal senada;

"Nggak ada mas, paling satpamnya itu yang kenal, makanya kemaren itu kan habis ada kesurupan itu katanya, katanya orang-orang itu lho mas, itu dikirimi sama warga yang ga suka disini" (wawancara 24 Agustus 2016)

Interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pabrik tidak terjadi seperti yang diharapkan, yaitu interaksi yang baik dan saling menguntungkan. Hal tersebut dimungkinkan karena atmosfer industri yang cenderung urban sedangkan kelurahan Guyangan sendiri masih merupakan daerah pedesaan yang guyub sehingga terjadi perbedaan sudut pandang antara pihak pabrik yang berdiri sendiri sedangkan masyarakat menuntut untuk pihak pabrik untuk lebih berpartisipasi di dalam masyarakat.

4.2.2.2 Perubahan Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi di Kelurahan Guyangan dapat diukur diantaranya dari peningkatan tingkat konsumsi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dengan kepemilikan benda fisik.

1. Daya Beli Masyarakat

Obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Nganjuk secara umum, khususnya adalah masyarakat kabupaten Nganjuk yang terkena imbas langsung dari pengembangan kawasan industri ini. Data wawancara dibawah ini memaparkan keadaan perubahan ekonomi masyarakat kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk setelah berdirinya beberapa pabrik di kelurahan tersebut.

Dibukanya pabrik baru berarti dibuka juga lapangan kerja bagi masyarakat, dan lapangan pekerjaan berarti jaminan peluang penghasilan yang tetap bagi para pencari kerja. Peningkatan daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator dari perubahan ekonomi yang di alami oleh warga kelurahan Guayangan. Lilah (18) menjelaskan bahwa sebelum dia bekerja di pabrik yang bekerja adalah kedua kakanya, yang setiap bulang mengirim uang untuk keperluan dia dan ayahnya, namun setelah dia bekerja di pabrik dia menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan untuk diberikan ke ayahnya juga sedikit bertambah, dan dia memiliki uangnya sendiri untuk membeli kebutuhannya sendiri;

"dulu yang kerja itu mas sama mbak saja, sekarang saya juga kerja, jadi uang yang dikasih ke bapak juga tambah banyak. - oh ya saya juga nyimpen buat saya sendiri nggak semua dikasih ke bapak, ya buat beli baju, bedak, trus nembok rumah" (wawancara 24 Agustus 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh Devi (18) yang masih tinggal dengan orang tuanya, sebelumnya mengandalkan uang saku dari orang tua untuk membeli barang-barang keinginannya, setelah bekerja di pabrik dia bisa membeli barang keinginannya sendiri;

"haha, buat beli hape baru mas, kalo makan kan saya masih ikut orang tua, nggak bayar kos sama beli makan sendiri" (wawancara 25 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Nur (25) meskipun tidak terlalu banyak menggunakan penghasilannya dan suaminya untuk membeli barang-barang keinginannya, Nur mengaku penghasilannya dan suaminya cukup untuk hidup sehari-hari dan sisanya ditabung untuk membeli rumah sendiri nanti dan antisipasi keperluan-keperluan mendadak;

"Nggak buat beli apa-apa mas, di tabung aja buat beli rumah nanti, yang penting buat hidup sehari-hari cukup" (wawancara 25 Agustus 2016)

Kurang lebih sama dengan Salbiyah (32) yang menggunakan pendapatannya untuk hidup sehari-hari dan mengansur hutang-hutang yang dimilikinya sebelum dia mulai bekerja di pabrik;

"yaa buat makan mas, sama dikit-dikit buat bayar utang mas" (wawancara 24 Agustus 2016)

Diluar lingkungan pabrik pun bisa dirasakan peningkatan daya beli masyarakat tersebut, seperti yang di ungkapkan Sumartiah (54);

"kalo saya saya beliin emas, mas, kalung sama gelang, kalo emas kan bisa sekalian buat investasi" (wawancara 24 Agustus 2016)

Sama halnya dengan Hardi (47) dengan pendapatan tambahannya mengelola jasa penitipan sepeda motor, dia bisa menggunakan uang tambahannya untuk membeli kredit sepeda motor baru untuk anaknya;

"itu mas buat kredit motor baru buat anak saya, ya lumayan" (wawancara 24 Agustus 2016)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdampak oleh pengembangan industri mengalami peningkatan pendapatan yang mempengaruhi peningkatan pembelian juga, dan yang sedikit lainnya lebih memilih untuk menabung untuk keperluan yang lebih besar lainnya.

2. Kepemilikan Benda Fisik

Salah satu indikator lain dari kesejahteraan masyarakat adalah kepemilikan benda fisik, baik itu Motor, TV atau alat elektronik lain, dan perabotan rumah tangga lainnya. Data dibawah ini menunjukkan keadaan narasumber terkait kepemilikan benda fisik tersebut, Lilah (18) menjelaskan;

"nggak punya motor mas dari dulu, bapak juga kalo kemana-mana masih naik sepeda, kalo mau nonton TV ke rumah tetangga, ya ini uangnya buat nembok rumah dulu, besok kalo udah selesai baru beli TV" (wawancara 24 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Salbiyah (32) pendapatannya di pabrik tidak memungkinkan untuk membeli barang-barang yang terlampau mahal karena

upah yang diterimanya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari dan sedikit ditabung;

"belum bisa mas buat beli yang macem-macem, ya buat kebutuhan sehari-hari aja" (wawancara 25 Agustus 2016)

Sedikit berbeda dengan Devi (18) yang nampaknya kebutuhan lain masih disokong oleh orang tuanya;

"buat beli hape mas, kan tadi udah dibilang, ya sama beli baju sendiri" (wawancara 25 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Nur (25) yang menggunakan pendapatannya untuk membeli perangkat seluler yang mendukung panggilan video untuk melakukan komunikasi dengan suaminya yang bekerja di luar pulau;

"buat beli hape sih mas kemaren, disuruh sama mas (suami) kan sekarang itu kalo video call udah murah pake line, dulu katanya kan di wartel itu telfon interlokal kan mahal satu jam bias puluhan ribu, saya juga ikut perkembangan teknologi kok mas" (wawancara 25 Agustus 2016)

Begitu juga dengan Sumartiah (54) dan Hardi (47) yang tadi telah menyebutkan bahwa pendapatan sambilannya digunakan untuk membeli emas dan sepeda motor.

Nampaknya memang penghasilan di pabrik tidak terlalu banyak yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan secara cepat, dengan UMR di Kabupaten Nganjuk yang hanya sekitar Rp 1,4 Juta perbulan, berbeda dengan Kota Surabaya dan Gresik yang menyentuh angka 3,3 dan 3,2 Juta rupiah perbualannya. Karyawan pabrik terutama harus menyisihkan

uangnya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya terlebih dahulu daripada membeli kebutuhan tersiernya.

4.2.3 Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Dampak Negatif dan Memaksimalkan Dampak Positif Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Nganjuk

4.2.3.1 Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Dampak Negatif

Upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif dalam pengembangan kawasan industri ini harus didasarkan pada keluhan masyarakat yang di adukan kepada pihak Kelurahan setempat yang akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk menindak lanjuti keluhan tersebut dan nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki kebijakan tersebut. Selama empat tahun berjalannya pengembangan kawasan industri di beberapa daerah di kabupaten Nganjuk tidak banyak keluhan masyarakat yang berarti yang menimbulkan keresahan secara besar baik bagi Pemilik Industri maupun masyarakat.

Beberapa masalah yang sering dikeluhkan masyarakat kepada pihak kelurahan adalah terkait tanah berdirinya pabrik. Seperti yang dijelaskan oleh Sumadji Kepala Kelurahan Guyangan;

"yang paling sering dikeluhkan masyarakat itu biasanya terkait tanah mas, jadi misalkan kemaren itu ada laporan dari warga, itu MPS kan tempatnya agak didalem ya, trus itu akses jalan masuk utamanya juga nglewatin rumah warga, nah kalo tanah berdirinya pabrik itu ga ada masalah, masalahnya tanah jalan lewatnya truk sama karyawan lain itu make tanahnya warga yang belum dibeli, jadi ya kemaren udah kita pertemukan

keduanya lalu pihak pabrik setuju untuk membeli tanah itu, ya dari warga nya nggak nuntut lebih jadi ya hanya itu tuntutan nya, nggak sampe yang rame demo buat nutup pabrik, ya kalo ditutup banyak ruginya mas" (wawancara 1 September 2016)

Begitu juga dengan pihak BPPT yang mengklaim selama ini belum pernah mendapatkan laporan keluhan yang serius terkait pengembangan kawasan industri tersebut. Agung, Kepala BBPT menjelaskan;

"Jarang ya mas ada keluhan dari warga itu, hampir ga pernah malah, soalnya di awal kan kita sudah melakukan amdal, lalu pihak pabrik kan juga sudah mengajukan izin gangguan dan pasti itu sudah ada diskusi dulu sebelumnya dengan warga sekitar bagaimananya" (wawancara 1 September 2016)

Masyarakat sekitar pabrik pun tidak terlalu merasakan dampak negatif dari berdirinya pabrik tersebut, dan justru merasakan dampak positifnya. Seperti di ungkapkan Sumartiah (54);

"Kalau dampak negatif apa ya mas? Kayaknya nggak ada, oh mungkin itu, kan sekarang jadi tambah banyak truk keluar masuk pabrik itu, jadi jalannya sedikit macet, trus jalannya jadi cepet rusak soalnya motor gede-gede sering lewat, kalo udah rusak itu debu nya kemana-mana" (wawancara 24 Agustus 2016)

Hal yang sedikit berbeda di ungkapkan Hardi (47) yang mencemaskan dengan ramainya di daerah tempat tinggalnya akan membawa dampak meningkatnya tingkat kriminalitas;

"Selama ini sih belum ada ya mas, tapi kan kita sebagai orang tua itu agak khawatir gitu kalo sekarang kan jadi tambah rame,

ya jadi takut aja, ini mana yang karyawan, mana yang mau jemput karyawan ato jangan-jangan ada yang mau nyuri itu kan ga tau" (wawancara 24 Agustus 2016)

Dari beberapa pernyataan di atas, memang terlihat tidak ada dampak negatif yang terlalu serius dari berdirinya pabrik tersebut, kecuali beberapa masalah tentang kerusakan jalan. Peneliti mengkonfirmasi ulang kepada pihak BPPT terkait upaya apa saja untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Agung selaku Kepala BPPT menjelaskan;

"Ya kalo memang keluhannya seperti itu (terkait kerusakan jalan) mungkin bisa dilaporkan kepada kami, tapi sebenarnya kalo urusan jalan itu mungkin ke dinas PU Bina Marga ya, mungkin kualitas aspal yang kurang bagus jadi jalannya cepet rusak atau bagaimana, tapi kan sampe sekarang kita belum menerima laporan tersebut secara tertulis dan sah jadi kita juga belum bisa membawa masalah tersebut ke Bappeda dan DPR untuk gimana penanggulangannya ato reformulasi kebijakannya" (wawancara 1 September 2016)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampai sejauh ini belum ada keluhan yang serius dari masyarakat terkait pengembangan pabrik di beberapa kawasan Kabupaten Nganjuk. Keluhan-keluhan kecil lainnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan dan tidak sampai ke tangan pemerintah daerah kabupaten maupun pengadilan. Dan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini adalah dengan berusaha tanggap dalam segala keluhan yang di alami masyarakat untuk kemudian didiskusikan dan dibawa kedalam musyawarah bersama Bappeda dan Dinas terkait yang lain.

4.2.3.2 Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Dampak Positif

Dampak positif dari dikembangkannya Industri di kabupaten Nganjuk lebih bisa dirasakan oleh masyarakat kabupaten Nganjuk daripada dampak negatifnya. Seperti di ungkapkan Sumartiah (54) yang telah merasakan keuntungan dari beroperasinya pabrik sepatu PT Kharisma Baru Indonesia ini;

"Ya jelas banyak mas untungnya kalo saya, ini toko juga jadi banyak yang beli, usaha kos juga, ini kalo rame gini kan juga hiburan, dulu kan sepi, apalagi dulu kan Guyangan terkenalnya sebagai tempat yang ga bener, sekarang ada pabrik gini jadi rame, orang-orang juga nggak mikir yang jelek-jelek lagi" (wawancara 24 Agustus 2016)

Hal senada juga diungkapkan Hardi (47) yang mengungkapkan hal sebagai berikut;

"Mungkin ini emang sengaja ya mas pihak pabriknya itu nggak ngasih tempat parkir di dalam jadi biar bisa ngasih untung buat warga sekitar yang mau buka parkiran, ya Alhamdulillah mas" (wawancara 24 Agustus 2016)

Peneliti mengkonfirmasi ke pihak BPPT terkait dampak positif tersebut dan menggali bagaimana upaya dalam memaksimalkan dampak positif tersebut. Kepala BPPT menjelaskan;

"Iya ini salah satunya kayak mas gini melakukan penelitian gini kan nanti jadi bahan referensi kita buat gimana kedepannya, ya kita pasti koordinasi dulu sama Bappeda sama Disperindag langkah apa saja yang di ambil untuk meamksimalkannya. Kalo sampe saat ini kan kita masih mengembangkan pabrik-pabrik itu di dekat jalan raya utama provinsi Madiun-Surabaya, dan imbasnya mungkin baru diraakan masyarakat yang dekat jalan raya saja. Mungkin nanti kalo jalan tol Solo-Surabaya itu sudah

jadi kita bisa perluas kawasan industri ke utara yang dilewati jalur tol itu" (wawancara 1 September 2016)

Tentu saja pihak pemerintah masih mengkaji dampak-dampak yang terjadi di dalam masyarakat melalui hasil-hasil penelitian dan kajian yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan dan referensi untuk bahan evaluasi yang salah satunya untuk menyusun upaya dalam memaksimalkan keuntungan yang didapatkan baik yang didapatkan oleh masyarakat maupun pemerintah secara umum karena dengan banyaknya industri yang berkembang di kabupaten Nganjuk nantinya akan mempengaruhi pendapatan perkapita kabupaten dan tentu saja dampak lingkungan yang dihasilkan.

4.3 Analisis dan Interpretasi

4.3.1 Pengembangan Kawasan Industri

4.3.1.1 Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri

Menurut Soenarko (2005:44) *Public policy* atau Kebijakan publik merupakan suatu keputusan. Namun tidak hanya sekedar keputusan yang hidup "*a standing decision*", yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (*public interest*). Dalam menetapkan kebijakan publik pasti menimbulkan pengorbanan dari sebagian masyarakat baik itu besar atau kecil.

Selain itu Kebijakan publik merupakan suatu keputusan legal; Kebijakan publik dilaksanakan oleh pejabat berwenang untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (*public interests*); Kebijakan publik

bermula dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik juga merupakan sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan (*issues*) yang berkembang di masyarakat. Baik pemerintah melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan itu kebijakan publik.

Kebijakan publik tidak berhenti di satu titik, melainkan berputar menurut isu-isu yang berkembang, permintaan dan keinginan (*demands*) rakyat, dan situasi yang menuntut diadakannya evaluasi kebijakan dan reformulation of public policy. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk juga membutuhkan dasar kebijakan seperti yang ada pada teori bahwa dasar kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Selain itu, dasar kebijakan juga dibutuhkan pemerintah dalam mengambil solusi dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Namun, hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pihak yang belum mengetahui adanya dasar kebijakan mengenai pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kurang terpublikasikan dasar kebijakan yang ada. Seperti dalam penyajian data bahwa pihak dari kelurahan belum sepenuhnya mengetahui adanya dasar kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tentang adanya pengembangan kawasan industri. Berbeda pendapat dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang menyatakan bahwa telah adanya dasar kebijakan tentang pengembangan

kawasan industri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

4.3.1.2 Proses Pengembangan Kawasan Industri

Pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Menurut Undang-Undang No. 03 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Dumairy (1996:227), istilah industri mempunyai dua arti yaitu:

“Pertama, Industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya, berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik; industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.”

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 19 M/SK/1986, Pengembangan industri di Kabupaten Nganjuk tergolong pada Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau

internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan teori dimana bertujuan untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tinggi dan bermanfaat tinggi. Kawasan industri di Kabupaten Nganjuk dimulai dengan berdirinya industri kecil dan menengah, namun setelah adanya dasar kebijakan yang jelas, pengembangan kawasan industri skala besar mengalami peningkatan. Hal ini sesuai juga dengan teori bahwa industri di Kabupaten Nganjuk tergolong pada industri besar. Diantaranya adalah perusahaan rokok PT. Langgeng Jaya Makmur yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (Sampoerna) atau disebut dengan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Pabrik Sebatu PT. Kharisma Baru Indonesia. Kedua perusahaan tersebut menurut hasil penelitian mempunyai tenaga kerja lebih dari 1000 karyawan dan hasil produksinya didistribusikan dalam skala nasional dan internasional.

Pengembangan industri di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dikarenakan telah efektifnya perizinan pendirian perusahaan. Proses pengembangan industri diawali dengan adanya penyederhaan perijinan yang mampu membuka kesempatan untuk perusahaan besar masuk di Kabupaten Nganjuk. Selain itu dasar kebijakan juga mendukung proses pengembangan kawasan industri seperti adanya persyaratan dan prosedur yang jelas. Dasar kebijakan yang jelas dan proses pengembangan

kawasan industri yang teratur akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dalam masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

4.3.2 Dampak Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Nganjuk

4.3.2.1 Perubahan Sosial Masyarakat

Menurut Kanto (2006:5). Perubahan sosial menunjuk pada suatu proses dalam sistem sosial dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur dan atau diamati dalam kurun waktu tertentu. Perubahan yang terjadi mungkin lebih ke arah kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*regress*). Perubahan sosial ke arah kemajuan identik dengan konsep pembangunan (*development*) yang umumnya merupakan dampak yang dikehendaki, sebaliknya dengan kemunduran yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dalam masyarakat.

Perubahan sosial masyarakat yang terjadi di Kabupaten Nganjuk lebih ke arah kemajuan (*progress*), dilihat dari kondisi masyarakat yang mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah banyaknya perusahaan skala besar yang masuk di Kabupaten Nganjuk. Perubahan sosial masyarakat dapat dilihat dari individu maupun organisasi yang ada di masyarakat, dilihat dari indikator pergeseran jenis pekerjaan dan gaya hidup, serta pertumbuhan migrasi dan interaksi masyarakat.

1. Pergeseran Jenis Pekerjaan

Perubahan sosial masyarakat sebagai dampak dari pengembangan kawasan industri dapat dilihat dari perubahan masyarakat dalam hal mata pencaharian. Adanya perusahaan skala besar mendukung masyarakat untuk membuka kesempatan baru dalam jenis pekerjaan. Pergeseran jenis pekerjaan menjadi salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Pergeseran jenis pekerjaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk diawali dengan adanya kesempatan didirikannya perusahaan skala besar dan adanya inovasi yang mendukung masyarakat untuk perubahan sosial masyarakat. Inovasi menjadi salah satu hal yang mendukung masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk melakukan perubahan sosial dengan adanya pergeseran pekerjaan.

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat pasti diakibatkan oleh adanya suatu sebab yang menimbulkannya. Demikian juga dengan perubahan sosial, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi faktor internal yaitu salah satunya adalah Inovasi, Proses terjadinya inovasi dimulai dengan adanya suatu penemuan baru khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Temuan baru ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan bukan untuk pemecahan masalah dalam masyarakat. Dari temuan baru tersebut kemudian berkembang menjadi invention yang dikaitkan dengan pemecahan masalah. Invention ini merupakan inovasi jika dalam penerapannya di masyarakat pengguna memberikan dampak pembaharuan atau terjadi

perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya. Jadi inovasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh McLuhan dalam Gumylar (2008) yang menganggap bahwa inovasi-inovasi dalam bidang teknologi banyak berpengaruh terhadap perkembangan di dalam masyarakat.

Adanya inovasi dari masyarakat dapat dilakukannya pergeseran pekerjaan. Menurut hasil penelitian terdapat beberapa pergeseran pekerjaan diantaranya: Asisten Rumah Tangga (ART) atau pengasuh bayi yang menjadi pekerja atau karyawan di pabrik sepatu, buruh tani yang menjadi karyawan pabrik sepatu, ibu rumah tangga yang membuka usaha kos dan toko kelontong, pegawai koperasi yang membuka usaha sambilan jasa penitipan sepeda motor dan masih banyak lainnya yang tidak terjamah oleh peneliti seperti usaha warung makan, jasa binatu (laundry) dan yang lainnya

2. Pertumbuhan Migrasi dan Interaksi Masyarakat

Dampak perubahan sosial masyarakat di Kabupaten Nganjuk dengan adanya pengembangan kawasan industri yang lain diantaranya pertumbuhan migrasi dan interaksi masyarakat. Pertumbuhan migrasi yang dimaksud adalah banyaknya masyarakat yang berdatangan di Kabupaten Nganjuk untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan pendatang yang menetap di kos-kosan di wilayah Kelurahan Guyangan. Namun, hal tersebut belum diketahui jumlah pasti dari masyarakat yang berdatangan di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut diakibatkan oleh belum jelasnya sistem yang mengatur dan mendata jumlah

warga yang berdatangan di Kelurahan Guyangan. Sehingga pemerintah kesulitan untuk mengetahui dan menyajikan jumlah pasti dan darimana pendatang tersebut berasal.

Menurut Kanto (2006:14) Perubahan struktur dan Jumlah Penduduk pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat, misalnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan dalam dunia kerja. Perubahan penduduk juga akan berpengaruh terhadap struktur kemasyarakatan, seperti struktur umur maupun yang lainnya. Selain itu perubahan jumlah penduduk karena migrasi juga akan mengakibatkan kekosongan-kekosongan dalam stratifikasi sosial dan pembagian kerja. Semakin cepat terjadinya migrasi (baik masuk maupun keluar) akan mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah warga yang masuk ke kelurahan guyangan atau peningkatan jumlah migrasi, namun, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi adanya perubahan yang signifikan pada pola interaksi masyarakat. Baik interaksi antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun masyarakat dengan pendatang baru.

4.3.2.2 Perubahan Ekonomi Masyarakat

Konsep ekonomi pembangunan lebih dipahami sebagai pertumbuhan. Konsep pertumbuhan (*growth*) dalam konteks ekonomi lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan yaitu kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu. Rostow dalam Suryono (2004:26) menjelaskan dalam teorinya tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, menurutnya terdapat lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi, adapun tahapan tersebut adalah: Tahap masyarakat tradisional, Penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis, Tahap tinggal landas, Tahap pematangan (pendewasaan) ekonomi, dan Tahap konsumsi massa tinggi

Lebih lanjut Suryono (2004:26) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga menyebutkan tiga faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu : Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah Perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan yang ketiga adalah Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Dampak pengembangan kawasan industri yang lainnya adalah adanya perubahan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kelurahan Guyangan. Pengembangan kawasan industri yang meningkat berdampak pada ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perubahan ini secara tidak langsung juga berpengaruh pada pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari kondisi ekonomi yaitu dengan dilihat dari daya beli masyarakat dan kepemilikan benda fisik.

1. Daya Beli Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya beli beberapa masyarakat mengalami peningkatan, baik masyarakat yang bekerja menjadi karyawan di pabrik, maupun warga sekitar pabrik. Ditunjukkan dengan beberapa narasumber yang dahulunya masih bergantung dengan pendapatan orang tua dan sekarang sudah bisa memenuhi kebutuhan dan membeli keinginannya sendiri, juga kemampuan narasumber yang dahulu hanya mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya setelah didirikannya pabrik dapat memenuhi kebutuhan tersiernya.

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat diamati dari tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita; dimana jika pendapatan suatu masyarakat melebihi jumlah penduduk, maka pendapatan perkapita juga meningkat. Meningkatnya pendapatan dari masyarakat yang dikarenakan

adanya pengembangan kawasan industri juga mampu meningkatkan kemampuan membeli dari masyarakat baik barang maupun jasa. Kemampuan membeli barang atau jasa ini yang dapat diartikan sebagai daya beli masyarakat.

Daya beli yang meningkat dari masyarakat ini merupakan dampak dari pengembangan kawasan industri. Masyarakat memiliki daya beli yang tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya pengembangan kawasan industri, dalam hal ini juga mampu mendorong masyarakat untuk membuka kesempatan baru dalam mendapatkan pendapatan yang lebih. Daya beli masyarakat yang meningkat menjadikan masyarakat mempunyai pola hidup dan gaya hidup yang berbeda juga. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak perubahan ekonomi dari adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, dengan indikator daya beli dari masyarakat.

2. Kepemilikan Benda Fisik

Dampak perubahan ekonomi masyarakat dari adanya pengembangan kawasan industri yang kedua dapat dilihat dari kepemilikan benda fisik. Jumlah kepemilikan benda fisik sebelum masuknya pengembangan kawasan industri dengan sesudah masuknya pengembangan kawasan industri mengalami perubahan yang signifikan. Adanya pengembangan kawasan industri membuka kesempatan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja bahkan membuka lapangan penghasilan yang baru. Kesempatan tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka meningkat

pula kemampuan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan kepemilikan benda fisik dari masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian bahwa beberapa masyarakat sekitar pabrik bisa membeli motor baru dari hasil jasa penitipan sepeda motor dan juga beberapa masyarakat yang kini mampu membeli logam mulia seperti emas sebagai investasi dari hasil usaha perdagangan dan usaha penyewaan kamar kos.

4.3.3 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Nganjuk

Peran pemerintah daerah yang paling lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang adalah model *traditional bureaucratic authority*. Ciri model ini adalah pemerintahan daerah yang bergerak dalam kombinasi tiga faktor, Pertama, penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (*strong public sector*). Kedua, peran pemerintah daerah sangat kuat (*strong local government*) karena memiliki cangkupan fungsi yang luas, model operasi yang bersifat mengarah, derajat otonomi yang sangat tinggi dan tingkat kendali eksternal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui banyak hal seperti adanya pengembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pengembangan kawasan industri secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak negatif dan positif. Oleh karena itu diperlukan peran dari pemerintah yang berbentuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam merespon dampak-dampak yang terjadi yang dikarenakan adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk. Upaya pemerintah daerah dalam menanggapi dampak-dampak dibagi menjadi dua diantaranya dalam meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

4.3.3.1 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Dampak Negatif

Dampak negatif ditimbulkan oleh interaksi manusia dan sumberdaya dalam proses pemenuhan kebutuhan. Suatu rencana kegiatan itu akan dinilai berdampak negatif apabila ternyata komponen kegiatan pengembangan atau pembangunan tersebut lebih menyebabkan kerusakan, kerugian atau penurunan kualitas pada rona lingkungan, baik fisik maupun nonfisik (biogeofisik), termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.

Dengan adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, pemerintah berupaya meminimalisir dampak negatif yang terjadi di masyarakat. Dampak negatif yang terjadi jika dilihat dari hasil penelitian salah satunya adalah kerusakan akses jalan di Kelurahan Guyangan. Kerusakan akses jalan yang terjadi dikarenakan seringkali masuknya kendaraan besar menuju ke perusahaan dengan kondisi letak perusahaan

melewati rumah dari masyarakat. Tidak munculnya dampak negatif yang parah dikarenakan adanya pengembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten Nganjuk hal ini dikarenakan sebelum masuknya perusahaan besar, pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan analisis dampak lingkungan tersebut dapat diketahui secara rinci dampak negatif yang akan ditimbulkan, sehingga pemerintah mampu mapu membuat dapat melakukan tindakan penanggulangan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi dengan adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kelurahan Guyangan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini adalah dengan berusaha tanggap dalam segala keluhan yang di alami masyarakat untuk kemudian didiskusikan dan dibawa kedalam musyawarah bersama Bappeda dan Dinas terkait yang lain. Namun dalam hal ini, pemerintah belum mempunyai upaya yang konkret dalam meminimalisir dampak negatif dikarenakan hingga saat ini masyarakat belum banyak mengalami dampak negatif, sehingga pemerintah daerah hanya mampu secara tidak langsung mencegah datangnya dampak negatif yang lain dari adanya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk khususnya di Kelurahan Guyangan.

4.3.3.2 Upaya Pemerintah dalam Memaksimalkan Dampak Positif

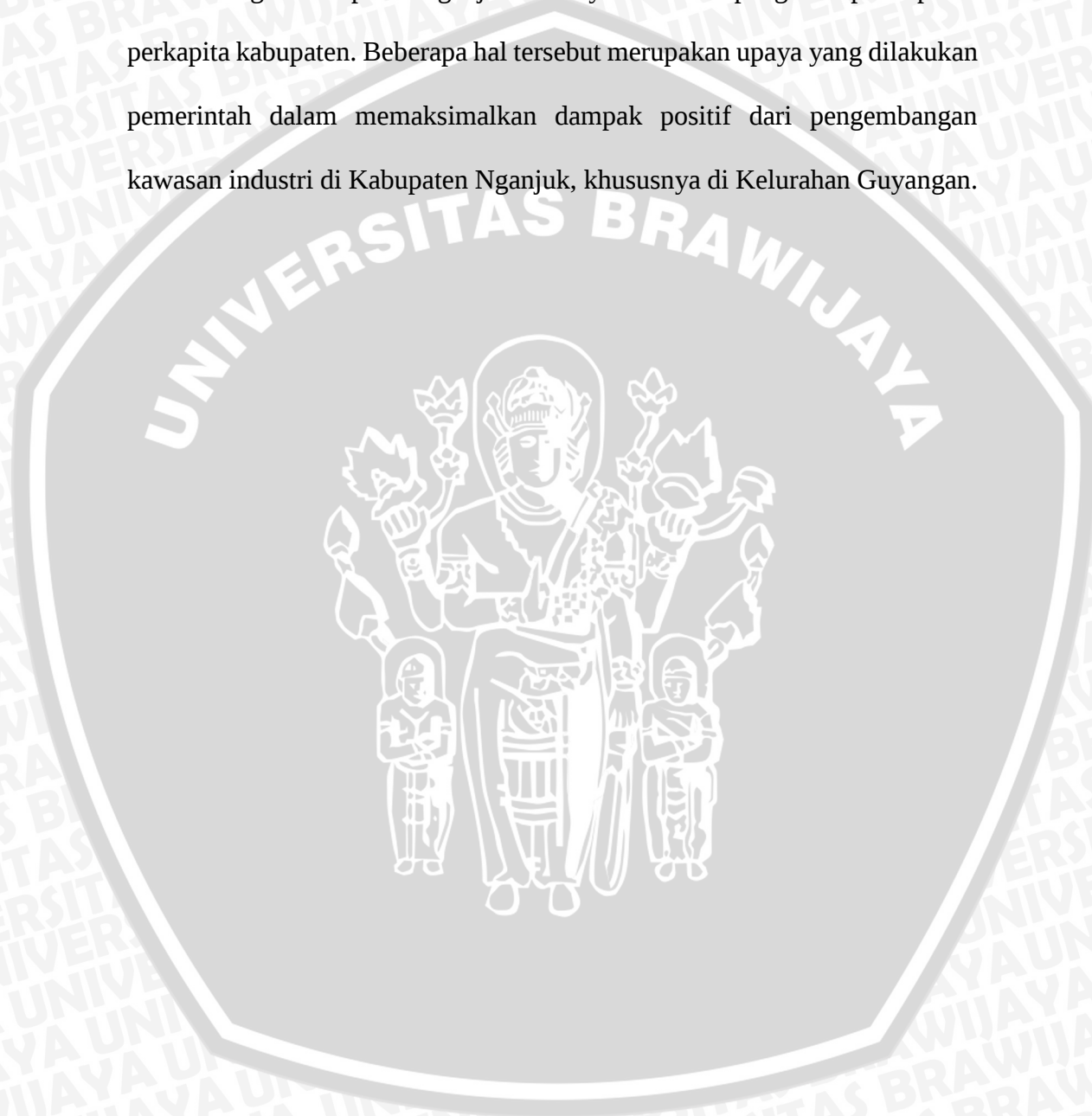
Dampak positif ditimbulkan oleh interaksi manusia dan sumberdaya dalam proses pemenuhan kebutuhan. Suatu rencana kegiatan itu akan dinilai

berdampak positif apabila kegiatan pengembangan atau pembangunan tersebut berdaya guna tinggi pada rona lingkungan, baik fisik maupun nonfisik (biogeofisik), termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.

Upaya pemerintah dengan adanya pengembangan kawasan industri adalah dengan memaksimalkan dampak positif. Menurut hasil penelitian bahwa dampak positif dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah membuka kesempatan masyarakat di kawasan industri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dengan memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kawasan industri. Beberapa usaha yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan industri diantaranya adalah dengan membuka rumah sewa atau kos-kosan, jasa penitipan sepeda motor dan terdapat beberapa usaha seperti membuka toko, warung makan dan jasa binatu atau lanundry. Usaha ini dilakukan masyarakat karena menyadari bahwa setelah masuknya perusahaan besar, kondisi di sekitar perusahaan menjadi ramai dan ini membuka peluang untuk masyarakat membuka usaha yang dapat menguntungkan. Hal tersebut adalah salah satu dari dampak positif yang ada dikarenakan adanya pengembangan kawasan industri.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk antara lain mengkaji dampak-dampak yang terjadi di dalam masyarakat melalui hasil-hasil penelitian dan kajian yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan dan referenrensi untuk bahan evaluasi yang salah satunya untuk menyusun upaya dalam memaksimalkan keuntungan yang didapatkan baik yang didapatkan oleh masyarakat maupun pemerintah secara umum dan

dengan memperluas area industri yang tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Nganjuk sehingga pembangunan bisa lebih merata dan berimbas kepada masyarakat yang lebih luas, karena dengan banyaknya industri yang berkembang di kabupaten Nganjuk nantinya akan mempengaruhi pendapatan perkapita kabupaten. Beberapa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan dampak positif dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kelurahan Guyangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan kawasan industri di kabupaten Nganjuk merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yaitu salah satunya membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dengan mulai beroperasinya beberapa pabrik baru di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya di Kelurahan Guyangan, hal tersebut membawa beberapa dampak yang dirasakan masyarakat, diantaranya adalah :

1. Dampak pengembangan kawasan industri terhadap perubahan sosial masyarakat diantaranya terjadi pergeseran jenis pekerjaan dan gaya hidup masyarakat sebelum dan sesudah beroperasinya pabrik di wilayah Kelurahan Guyangan. Selain itu dibukanya beberapa pabrik di kelurahan Guyangan juga berdampak pada pertumbuhan migrasi atau perpindahan masyarakat dari luar kelurahan Guyangan maupun luar Kabupaten Nganjuk ke Kelurahan Guyangan.
2. Pengembangan kawasan industri juga berdampak terhadap perubahan ekonomi masyarakat diantaranya adanya peningkatan daya beli masyarakat yang dahulunya hasil dari pekerjaannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kini bisa memenuhi kebutuhan tersier, serta adanya peningkatan kepemilikan benda fisik dari

masyarakat seperti sepeda motor baru hasil dari penghasilan tambahan dari jasa penitipan sepeda motor dan logam mulia emas sebagai bentuk investasi dari hasil usaha.

3. Dalam pengembangan kawasan Industri di kabupaten Nganjuk, pemerintah cukup jeli dalam mengantisipasi adanya dampak negatif akibat pembangunan ini, pemerintah sudah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan di awal sebelum proses pembangunan, sehingga minim aduan atau laporan masyarakat mengenai dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk,
4. Beberapa upaya pemerintah yang disampaikan secara normatif dari adalah pemerintah berusaha tanggap dalam segala keluhan yang di alami masyarakat untuk kemudian didiskusikan dan dibawa kedalam musyawarah bersama Bappeda dan Dinas terkait yang lain. sedangkan dalam memaksimalkan dampak positif dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk antara lain mengkaji dampak-dampak yang terjadi di dalam masyarakat melalui hasil-hasil penelitian dan kajian yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan untuk bahan evaluasi untuk menyusun strategi perluasan kawasan industri.

5.2 Temuan Penelitian

Selain data-data yang diharapkan muncul oleh peneliti, data atau informasi lain yang tidak menjadi fokus penelitian juga muncul sebagai temuan penelitian, diantaranya adalah;

1. Meningkatnya pertumbuhan migrasi tidak disertai dengan tertibnya administrasi atau pendataan pendatang baru di Kelurahan Guyangan.
2. Belum banyak masyarakat Kelurahan Guyangan yang paham tentang apa yang dimaksud dengan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan apa kegunaannya.

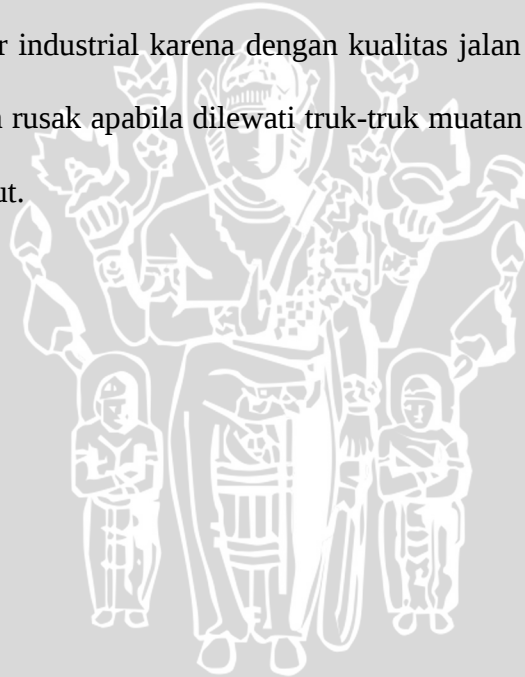
5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis;

1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Kelurahan Guyangan diharapkan bisa menerapkan sistem pendataan pendatang baru dan regulasi tentang usaha penyewaan kos sebagai bentuk tertib administrasi dan sebagai informasi perkembangan demografi salah satunya dengan melakukan Kerjasama dengan Pabrik untuk bisa menyerahkan informasi karyawan.
2. Pemerintah kabupaten Nganjuk diharapkan bisa melakukan penyebaran informasi yang lebih luas tentang dasar kebijakan dan peraturan dari pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk, sehingga masyarakat bisa turut serta mengawasi proses

kebijakan pengembangan tersebut, serta memberikan kejelasan tentang sistem kebijakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kontribusi industri terhadap masyarakat sekitar area pabrik.

3. Pemerintah kabupaten Nganjuk khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bisa melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas-dinas lainnya (PU Bina Marga dan Cipta Karya) terkait dengan penyesuaian kapasitas infrastruktur fasilitas umum seperti jalan desa yang perlu ditingkatkan standardnya dengan jalan yang standar industrial karena dengan kualitas jalan standar desa lebih mudah rusak apabila dilewati truk-truk muatan besar dari industri tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making Second Edition*. United State of America: Holt, Rinehart, and Winston.
- Budiyanto. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Daryanto. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indoneia Lengkap*. Surabaya: Appolo.
- Data Statiskik wilayah industri dan PDRB Kabupaten Nganjuk, diakses pada 5 Mei 2015 melalui : nganjukkab.bps.go.id
- Dumiary. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy, Fourth Edition*. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs. N.J07632
- Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kanto, Sanggar. 2006. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Malang: Unit Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Industri Indonesia: Menjadi Negara Industri Baru*. Yogyakarta: Adi.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayu Media.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Gracindo.
- Nurrohmah, Eva. 2016. Lengkong Sasaran Industri. Diakses pada 5 Juni 2016 melalui : <http://kertosono.net/lengkong-sasaran-industri/>
- Parson, Wahyne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal
- Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar: Alfabeta Bandung.

- Poerwadarminto, W. J. S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radar Kediri. 2016. Belum Tetapkan Kawasan Industri. Diakses pada 5 Mei 2016 dari: <http://radarkediri.net/radarnganjuk/pemerintahan/belum-tetapkan-kawasan-industri/>
- Roziqin, Miftahur. 2014. Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Nganjuk dari Akar Rumpun. Diakses pada 5 Juni 2016 dari : <http://miftahur.com/perkembangan-ekonomi-di-kabupaten-nganjuk-dari-akar-rumpun/>
- Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Syarief, Syahrial. 1991. *Industri dan Kesempatan Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wahab. Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widarti, Peni. 2015. KAWASAN INDUSTRI JAWA TIMUR: Agresif Menyisir Lokasi Alternatif, diakses pada 5 Mei 2016 dari: <http://industri.bisnis.com/read/20151001/45/477882/kawasan-industri-jawa-timur-agresif-menyisir-lokasi-alternatif>
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang : IKIP Malang.

Curicullum Vitae

Nama : Afin Kurnia Dewantara
 TTL : Nganjuk, 5 Agustus 1993
 Umur : 23 Tahun
 Alamat Asal : Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
 Alamat Malang : Jalan Bunga Kumis Kucing No. 12 Malang
 NIM : 125030500111055
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik
 Universitas : Brawijaya
 No. Hp : 085604505955
 Email : addewa27@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :
 Pendidikan Formal

1999-2005	SDN Wilangan 1 Nganjuk
2005-2008	SMP Negeri 3 Nganjuk
2008-2011	SMA Negeri 1 Nganjuk
2012-sampai Sekarang	Universitas Brawijaya

Pendidikan Non-Formal dan Pengalaman Organisasi

2010-2011	Paskibraka Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
	Pengurus Purna Paskibraka Kab. Nganjuk 2010
	LBB Primagama di Nganjuk
2012-2013	Staff Public Relation Departemen Hubungan Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2013
	Volunteer Pengabdian Masyarakat HUMANISTIK 2013
	Staff Temu Administrator Muda Jawa Timur 2013 di Universitas Brawijaya

	Ketua Pelaksana Temu Administrator Muda Indonesia di Universitas Brawijaya 2013
2014	Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2014
	Anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2014
	Staff Nationwide English Debate di English Parade 2014 Administration English Club FIA UB
	Steering Committee Pemilihan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2015
2015	Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik
	Komisi Informasi Jatim <i>Goes To Campus</i> (Forum Komunikasi dan Sosialisasi)
	Workshop “Prospek Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Modern”
	Training dan Magang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk

Pengalaman Kepanitian

2012-2015	Class Discussion Program Studi Pemerintahan
	Dies Natalis Humanistik 2013
	Temu Administrator Muda Indonesia di Universitas Brawijaya 2013
	Study Excursie Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2013
	Pengabdian Masyarakat HUMANISTIK 2013

Lomba Karya Tulis Ilmiah Explosion
Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Workshop Karya Tulis Ilmiah 2014
Night Concert Dies Natalis Humanistik On Decade
Administrator's Action The 4 th Annual Panel Discussion
Workshop Karya Tulis Ilmiah 2015
Rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Di Hotel Harris Surabaya

